PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, puji syukur kehadirat Allah *swt*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan dan petunjuk sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 menyusun LPPD ini atas perintah peraturan perundangan-undangan yang memberikan kewajiban kepada Bupati untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan 70 (3), Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang Lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini: (1) akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan (4) penerapan serta pencapaian standar pelayanan minimal. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD ini bersumber dari masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Data untuk capaian kinerja makro diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya. Selain itu, dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap capaian kinerja makro dan capaian kinerja

urusan pemerintahan didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten Kediri untuk direviu oleh Inspektorat Kabupaten Kediri.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten Kediri dan semua SKPD yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam penyusunan laporan ini.

Demikian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Semoga data yang tersaji menjadi rujukan dalam pengambilan berbagai keputusan pembangunan di Kabupaten Kediri untuk mencapai visi Kabupaten Kediri: "Terwujudnya Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis-religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani."

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kediri, 25 Maret 2021

BUPATI KEDIRI

H. HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....

DAFTAR ISI..... ....

BAB I PENDAHULUAN..... ....

1.1 Latar Belakang..... .....

1.1.1. Penjelasan Umum..... .....

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah..... .....

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... .....

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... ....

2.1. Capaian Kinerja Makro..... .....

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... .....

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran ....

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil ....

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah..... .....

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... .....

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM..... .....

BAB V PENUTUP..... .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Pembentukan Daerah

Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang tersebut telah dibentuk 29 kabupaten di Jawa Timur antara lain : Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Panarukan, Sampang, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, **Kediri**, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

b. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111^{o} 47’ 05” s.d. 112^{o} 18’ 20” Bujur Timur dan 7^{o} 36’ 12’’ s.d. 8^{o} 0’ 32” Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.523,92 km^{2}. Kabupaten Kediri secara administratif terbagi menjadi 26 kecamatan yang terdiri dari 343 desa dan 1 kelurahan.

Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

- Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha, merupakan jenis tanah yang Sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan,

Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang, dan Gampengrejo.

- Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.
- Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti di Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen, dan Mojo.
- Mediteran coklat merah, grumusol kelabu seluas 13.556 Ha terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare, dan Kunjang.
- Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Kandangan.

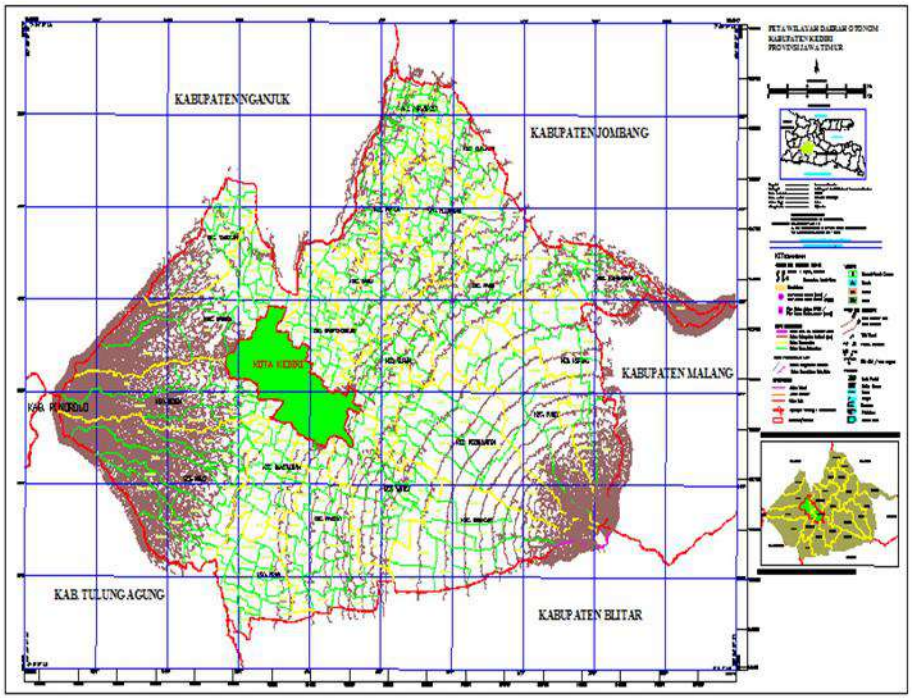
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kediri didominasi untuk lahan pertanian seluas 98.208 Ha atau sekitar 70,85% dari total luas wilayah dimana luas lahan pertanian tersebut terdiri dari lahan sawah seluas 51.968 Ha dan lahan bukan sawah seluas 86.637 Ha. Penggunaan lahan lainnya adalah guna lahan bukan pertanian seluas 40.397 Ha atau sebesar 29,15% dari total luas wilayah.

Berdasarkan struktur tata ruang wilayah yang telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, bahwa untuk kebijakan pembagian wilayah pembangunan di Jawa Timur menempatkan Kabupaten Kediri sebagai salah satu Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Timur, yaitu Wilayah Pengembangan (WP) Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri dengan pusat

pelayanan di Kota Kediri. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara:Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Timur:Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Selatan:Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- Sebelah Barat:Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Peta administrasi Kabupaten Kediri :



Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1) Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;
2) Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri;

3) Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri untuk pengembangan sistem pusat pelayanan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2010-2030 dengan tujuan mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Adapun pembagian pusat kegiatan di Kabupaten Kediri untuk penataan ruang dan wilayah meliputi:

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kawasan perkotaan meliputi: Perkotaan Kecamatan Ngasem dan Pare.
2) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berorientasi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam wilayah kabupaten yang meliputi: Perkotaan Kecamatan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen dan Grogol.
3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan yang meliputi Kecamatan : Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo, Ngancar, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas, Kunjang, Purwoasri dan Plemahan.
4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan meliputi Kecamatan : Grogol, Tarokan, Banyakan, Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, Wates, Ngancar, Gurah, Pagu, Plosoklaten,

Puncu, Kepung, Kandangan, Papar, Kunjang, Purwoasri, Plemahan dan Semen.

Di samping itu Kabupaten Kediri memiliki kawasan strategis yang ditentukan berdasarkan adanya aspek kepentingan :

1) Kawasan pertumbuhan ekonomi yang terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa dan rekreasi meliputi :
   a) Kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan : Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya dan sapi perah;
   b) Kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan : Pare, Kandangan, Puncu, dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe, bawang merah dan sayuran;
   c) Kawasan agropolitan Segobatam meliputi Kecamatan : Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan berupa mangga podang dan ubi kayu;
   d) Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan : Papar, Plemahan, Purwoasri, Kayen Kidul, Pagu, Gurah, Kunjang dan Gampengrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija;
   e) Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi berupa pengembangan *Central Business District* (CBD) Simpang Lima Gumul.
2) Sosial dan budaya meliputi : penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca

Totok Kerot, Pesanggrahan Jenderal Sudirman, dan Situs Tondowongso; dan

3) Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan rawan banjir yaitu :
   a) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.
   b) Kawasan rawan banjir, berada di Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

c. Kependudukan

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Kediri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.673.158 jiwa, terdiri dari laki-laki 845.152 jiwa (50,51%) dan perempuan 828.006 jiwa (49,49%). Dari data tersebut juga nampak bahwa tahun 2021 terdapat penurunan pertumbuhan penduduk sebesar 0,02 % yang terjadi pada penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga *Sex Ratio* Kabupaten Kediri 102,33 % di tahun 2020 turun menjadi 102,07 % di tahun 2021.

Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2019-2021

(Orang)

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	LAKI-LAKI	836.688	846.441	845.152
2	PEREMPUAN	820.985	827.128	828.006
JUMLAH		**1.657.673**	**1.673.569**	**1.673.158**
Sex Ratio (%)		***101,91***	***102,33***	***102,07***

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri tahun 2021 mencapai 1.097,93 jiwa/km^2. Kecamatan Ngasem merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 2.731,41 jiwa/km^2. Di

Distribusi penduduk menurut kecamatan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.2. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kediri Pada Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	JUMLAH PENDUDUK			KEPADATAN PENDUDUK (Org / Km²)
			LAKI-LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)	JUMLAH (Orang)	
1	S E M E N	87,78	27.695	26.807	54.502	620,89
2	M O J O	141,50	41.483	39.881	81.364	575,01
3	K R A S	44,70	32.280	32.024	64.304	1.438,57
4	NGADILUWIH	43,06	40.661	40.470	81.131	1.884,14
5	K A N D A T	54,37	31.786	31.462	63.248	1.163,29
6	W A T E S	73,51	46.410	45.836	92.246	1.254,88
7	NGANCAR	101,12	26.375	25.751	52.126	515,49
8	P U N C U	94,92	33.449	32.290	65.739	692,57
9	PLOSOKLATEN	108,19	38.634	37.751	76.385	706,03
10	G U R A H	54,10	42.352	41.677	84.029	1.553,22
11	P A G U	26,29	20.689	20.350	41.039	1.561,01
12	GAMPENGREJO	18,36	17.309	16.793	34.102	1.857,41
13	G R O G O L	47,61	24.898	24.128	49.026	1.029,74
14	P A P A R	39,87	27.686	27.350	55.036	1.380,39
15	PURWOASRI	45,26	31.015	30.871	61.886	1.367,34
16	PLEMAHAN	50,87	31.759	31.260	63.019	1.238,82
17	P A R E	49,69	54.554	54.103	108.657	2.186,70
18	KEPUNG	90,03	44.642	42.878	87.520	972,12
19	KANDANGAN	59,64	26.807	26.226	53.033	889,22
20	TAROKAN	47,92	33.365	32.074	65.439	1.365,59
21	KUNJANG	31,81	19.240	19.048	38.288	1.203,65
22	BANYAKAN	63,11	30.421	29.633	60.054	951,58
23	RINGINREJO	46,51	29.792	28.960	58.752	1.263,21
24	KAYEN KIDUL	37,64	24.585	24.361	48.946	1.300,37
25	N G A S E M	23,43	32.000	31.997	63.997	2.731,41
26	B A D A S	42,63	35.265	34.025	69.290	1.625,38

J U M L A H	**1.523,92**	**845.152,00**	**828.006,00**	**1.673.158,00**	**1.097,93**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri

d. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Kediri secara administratif terbagi menjadi 26 kecamatan dengan 343 desa dan 1 keluarahan. Penggambaran yang lebih jelas mengenai jumlah kecamatan, luasan dan jumlah desa tiap kecamatan selengkapnya dijelaskan pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Kondisi Wilayah Berdasarkan Kecamatan dan Jarak Terhadap Ibu Kota Kabupaten

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km²)	JARAK TERHADAP IBU KOTA	DESA / KELURAHAN
1	S E M E N	87,78	10,00	12
2	M O J O	141,50	16,00	20
3	K R A S	44,70	22,00	16
4	NGADILUWIH	43,06	14,00	16
5	K A N D A T	54,37	15,00	12
6	W A T E S	73,51	15,00	18
7	NGANCAR	101,12	27,00	10
8	P U N C U	94,92	28,00	8
9	PLOSOKLATEN	108,19	15,00	15
10	G U R A H	54,10	6,00	21
11	P A G U	26,29	8,00	13
12	GAMPENGREJO	18,36	9,00	11
13	G R O G O L	47,61	14,00	9
14	P A P A R	39,87	16,00	17
15	PURWOASRI	45,26	23,00	23
16	PLEMAHAN	50,87	18,00	17
17	P A R E	49,69	22,00	10
18	KEPUNG	90,03	27,00	10
19	KANDANGAN	59,64	33,00	12
20	TAROKAN	47,92	16,00	10
21	KUNJANG	31,81	26,00	12
22	BANYAKAN	63,11	11,00	9
23	RINGINREJO	46,51	22,00	11
24	KAYEN KIDUL	37,64	12,00	12

25	N G A S E M	23,43	2,00	12
26	B A D A S	42,63	25,00	8

e. Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri terdiri dari Perangkat Daerah yang didukung dengan pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	S K P D	JUMLAH	JUMLAH PEGAWAI
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri	1	132
2	Inspektorat Kabupaten Kediri	1	48
3	B a d a n	7	228
4	D i n a s	21	7641
5	Badan Layanan Umum Daerah	1	419
6	Sekretariat DPRD	1	29
7	Kantor Kecamatan	26	439
J U M L A H		**58**	**8.936**

Untuk Sekretariat Pemerintah Kabupaten terdiri 6 Bagian, yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum dan Bagian Organisasi dengan dukungan pegawai sebanyak 132 orang.

Badan Daerah terdiri dari 7 Badan, yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencana Pembangunan Daerah dengan dukungan pegawai semua Badan sebanyak 228 orang.

Untuk Badan Layanan Umum Daerah hanya ada satu institusi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pare dengan 419 orang pegawai sedangkan untuk Kecamatan terdapat 26 Kecamatan dengan dukungan 439 pegawai.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daaerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Dalam perkembangan informasi dan teknologi pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan yang dapat mewujudkan keterbukaan dan pertanggungjawaban agar mempermudah akses data yang dibutuhkan oleh setiap unsur yang memiliki kepentingan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub- sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar tercermin pada kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah,

efisiensi dan efektivitas belanja serta ketepatan dalam pemanfaatan potensi pembiayaan daerah.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

KODE	URAIAN	TARGET	REALISASI *)	%
1. 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	209.861.000.000,00	215.296.696.264,19	102,59
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.606.705.950,00	25.581.608.369,00	113,16
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.980.539.875,20	10.082.765.027,00	101,02
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193.790.062.695,54	252.953.142.483,43	130,53
	JUMLAH	**436.238.308.520,74**	**503.914.212.143,62**	**115,51**
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89.039.438.000,00	115.706.654.390,00	129,95
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.176.199.423.000,00	1.166.589.629.000,00	99,18
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	384.599.314.000,00	378.152.782.172,00	98,32
	JUMLAH	**1.649.838.175.000,00**	**1.660.449.065.562,00**	**100,64**
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**			
1.3.1	Pendapatan Hibah	140.159.634.888,76	171.602.928.963,00	122,43
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	131.868.255.676,00	164.766.607.543,00	124,95
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi	372.864.492.000,00	372.864.492.000,00	100,00

KODE	URAIAN	TARGET	REALISASI *)	%
	Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.300.429.000,00	7.308.349.000,00	100,11
1.3.6	Pendapatan Lainnya	60.000.000,00	3.875.105.261,90	6.458,51
	JUMLAH	**652.252.811.564,76**	**720.417.482.767,90**	**110,45**
TOTAL PENDAPATAN		**2.738.329.295.085,50**	**2.884.780.760.473,52**	**105,35**

Sumber : BPKAD Kab. Kediri

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020

KODE	URAIAN	TARGET	REALISASI *)	%
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.109.269.810.108,00	969.651.748.759,00	87,41
2.1.4	Belanja Hibah	150.357.898.590,00	141.857.904.190,00	94,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	95.700.435.247,00	68.308.471.426,32	71,38
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.470.000.000,00	22.241.423.000,00	98,98
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	501.401.286.700,00	500.451.617.500,00	99,81
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	207.084.215.157,34	88.432.937.186,35	42,70
	JUMLAH	**2.086.283.645.802,34**	**1.790.944.102.061,67**	**85,84**
2.2	**BELANJA LANGSUNG**			
2.2.1	Belanja Pegawai	121.222.741.907,67	106.532.618.211,86	87,88
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	637.279.446.560,31	533.951.634.525,64	83,79
2.2.3	Belanja Modal	458.247.805.966,80	410.102.464.137,75	89,49

KODE	URAIAN	TARGET	REALISASI *)	%
	JUMLAH	**1.216.749.994.434,78**	**1.050.586.716.875,25**	**86,34**
JUMLAH BELANJA		**3.303.033.640.237,12**	**2.841.530.818.936,92**	**86,03**

Sumber : BPKAD Kab. Kediri

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Visi Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, visi pembangunan Kabupaten Kediri adalah :

"Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintahan yang Profesional"

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kediri tersebut ditetapkan 15 (lima belas) misi pembangunan yang meliputi :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni;

2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman;
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan;
6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro;
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah;
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan;
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha;
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan;
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi;
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang;
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi;
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang;

15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Reformasi birokrasi khususnya dalam bidang pelayanan publik terus digulirkan walau belum membuahkan hasil yang ideal, yaitu birokrasi yang berpijak pada peningkatan pelayanan administrasi publik. Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan dalam rangka melakukan reformasi birokrasi guna mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia.

Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah atau yang disebut

desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensipnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan didaerah. Dari dua pertimbangan di atas, selanjutya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sampai saat ini Pemerintah telah menetapkan SPM sebanyak 6 (enam) bidang urusan yang di terapkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya SPM diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. SPM bakal menjadi *entry point* atas kurang memuaskannya aspek pelayana publik selama ini. Cerita mengenai birokrasi yang lamban, berbelit-belit dan kadang diwarnai beragam pungutan diperkirakan akan berakhir atau setidaknya dapat diminimalisasi oleh konsistensi pemberlakuan SPM, sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar yang sama di lokasi manapun mereka tinggal akan segera terwujud. Oleh karena itu, keberadaan SPM otomatis menuntut Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah untuk selalu memberikan pelayanan prima dengan memberikan standart baku pedoman pelayan publik dengan mempertimbangkan keunikan dan kemampuan daerah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses untuk memperoleh berbagai pelayanan yang merupakan kebutuhan dan hak dasar masyarakat secara individual.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui SKPD yang membidangi pelayanan dasar berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan SPM tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesbilitas pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dan berhak diperoleh setiap warga secara minimal dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance.*

Penerapan SPM dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan “Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)” Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 11;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar PPDA Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan Umum

Kebijakan umum pembangunan Daerah jangka menengah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tertuang dalam Visi Pembangunan Kabupaten Kediri adalah :

"Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan berkeadilan yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. **Terwujudnya,** yaitu menjamin terlaksananya semua program pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Kediri.
b. **Ketahanan Pangan,** yaitu terwujudnya ketahanan pangan untuk menuju swasembada pangan. Hal ini sangat penting karena swasembada pangan merupakan jalan lintas menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.
c. **Masyarakat Kabupaten Kediri,** yaitu satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan Kabupaten Kediri
d. **Yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan,** yaitu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya.
e. **Yang didukung oleh aparatur pemerintah yang professional,** yaitu melakukan usaha reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, sekaligus membentuk aparatur pemerintah yang loyal, cerdas, kreatif, responsive terhadap kepentingan masyarakat rajin dan handal

sehingga dapat melayani masyarakat secara maksimal, serta perilakunya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Kaitan dengan kebijakan umum tersebut dalam mendukung Misi Pemerintah Kabupaten Kediri dikaitkan dengan penerapan dan pencapaian SPM dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan Dasar

   Kebijakan umum bidang pendidikan dasar didukung oleh misi Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
2. Bidang Urusan Kesehatan

   Kebijakan umum bidang kesehatan didukung oleh misi yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Kebijakan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang didukung oleh misi membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

   Kebijakan umum bidang perumahan rakyat didukung oleh misi meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
5. Bidang Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

   Kebijakan umum bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat didukung oleh misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
6. Bidang Urusan Sosial

Kebijakan umum bidang urusan sosial didukung oleh misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman

Arah Kebijakan

Kebijakan Umum adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kebijakan adalah ketentuan – ketentuan yang digunakan sebagai pedoman, pegangan/petunjuk dalam pengembangan program kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Penjabaran kebijakan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 khususnya dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan dari strategi menumbuh kembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan dengan cara menyelenggarakan pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal;
2. Arah kebijakan dari strategi mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan dengan cara meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
3. Arah kebijakan dari strategi membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang dengan cara mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pembangunan;

4. Arah kebijakan dari strategi meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Arah kebijakan dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman dengan cara meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diposisikan untuk menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis dan mutu yang ditetapkan .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan agar Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan Dengan Standar pelayanan Minimal (SPM). Dengan demikian jelaslah, bahwa peran SPM sebagai indikator

kinerja urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar semakin vital dan stategis.

Penerapan SPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar minimal . Terdapat 6 (enam) SPM wajib oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum
4. Bidang Perumahan Rakyat
5. Bidang Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
6. Bidang Sosial.

1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten atau kota terdiri atas:

a. pendidikan dasar;

b. pendidikan kesetaraan; dan

c. pendidikan anak usia dini.

Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator SPM	Target (%)	
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam penerpan pendidikan dasar (SD/Mi, SMP, MTs)	100	2020
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2020
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Paud	100	2020

Realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1.	**Pendidikan Dasar**	**Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)**			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**87.37%**
		221.143	**212.522**	**8.621**	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Buku Teks Pelajaran	212.522	212.522	0	100%
	b. Perlengkapan Belajar	212.522	212.522	0	100%
	c. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.098	1.009	89	91,89%
	d. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.107	983	1124	46,65%
	e. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	9.316	9.316	0	100%
	f. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	1.098	1.056	42	96,17%

	g. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	212.522	212.522	0	100%
	h. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	20.232	13.004	7.228	64,27%
2.	**Pendidikan Kesetaraan**	**Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**91,67%**
		4.328	**1.888**	**2.440**	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Modul Belajar	1.888	1.888	0	100%
	b. Perlengkapan Belajar	1.888	1.888	0	100%
	c. Jumlah rombongan belajar di PKBM	85	85	0	100%
	d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.888	1.888	0	100%
	e. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	550	550	0	100%
	f. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	33	33	0	100%
	g. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	33	33	0	100%
	h. PKBM Terakreditasi minimal C	33	11	22	33,33%
3.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**91,19%**
		64.814	**64.054**	**760**	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Buku Gambar	64.054	64.054	0	100%
	b. Alat Mewarnai	64.054	64.054	0	100%
	c. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	987	706	281	71,53
	d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	64.054	64.054	0	100%
	e. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	987	902	85	91,39%
	f. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.723	2.054	669	75,43%
	g. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.447	3.447	0	100%
Total Capaian Bidang Pendidikan Kab. Kediri				**90,08 %**	

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	**Pendidikan Dasar**			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**132.126.052.563**	**129.543.031.074**	**98,05%**
	a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.220.230.200	7.662.614.570	83,11%
	b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	85.767.139.363	85.275.183.717,48	99,43%
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	625.809.000	625.659.000	99,98%
	d. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan dasar	1.827.989.500	1.755.774.787	96,05%
	e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	848.369.000	693.909.000	81,79%
	f. Penambahan Ruang Kelas Baru	8.576.543.000	8.311.615.000	96,91%
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	25.067.152.500	25.025.955.000	99,84%
	h. Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan	192.820.000	192.320.000	99,74 %
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**57,718,061,888**	**57,716,603,052**	**100%**
	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	49.718.061.888,76	49716603052,47	100%
	b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.000.000.000	8.000.000.000	100%
	Kegiatan lain	**660.671.000**	**599.643.000**	**90.76%**
	Penyelenggaraan Proses Belajar SD dan SMP	660.671.000	599.643.000	90.76%
2.	**Pendidikan Kesetaraan**			
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**25.738.029.000**	**25.595.699.000**	**99,45%**

	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	4.902.400.000	4.902.200.000	100%
	b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	105.000.000	0	0 %
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98.979.000	98.979.000	100%
	d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	631.650.000	594.520.000	94,12%
	e. Penyediaan Beasiswa Untuk Anak Miskin	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
3.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**37.007.566.000**	**34.817.245.800**	**94.08%**
	a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	199.880.000	99,94%
	b. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000	94.032.000	94,03%
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1711440000	1696307800	99,12%
	d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	453.000.000	451.975.000	99,77%
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang guru PAUD	296.326.000	71.351.000	24,08%
	f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	34.246.800.000	32.303.700.000	94,33%
Total		**253.250.380.451**	**248.272.221.926**	**98.03%**

Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian	
			Kinerja	Anggaran
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam penerpan pendidikan dasar (SD/Mi, SMP, MTs)	87,37%	99,05%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	91,67%	99.45%
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Paud	91,19%	94.08%
Total			**90,08%**	**98.03%**

Dukungan Personil Bidang Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, termasuk dalam rangka penerapan pelayanan SPM, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh:

1. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas;
2. 4 (empat) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Ketenagaan, dan Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan;
3. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
4. 12 (dua belas) orang Kepala Seksi, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga, ketiganya di bawah kendali dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga. Sedang Kepala Bidang Pendidikan Dasar mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Sekolah Dasar, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar. Kepala Bidang Ketenagaan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Guru, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Kepala Seksi Sarana Prasarana

Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan;

5. 4 (empat) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri;
6. 611 (enam ratus sebelas) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SD Negeri yang berada pada 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Kediri;
7. 52 (lima puluh dua) orang Kepala UPTD SMP Negeri; dan
8. 1 (satu) orang Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan dibantu pula oleh kelompok jabatan fungsional, yang terdiri atas pengawas sekolah, dan penilik pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

Dari 3 indikator yang ada, akan disajikan satu per satu permasalahan dan solusi penerapan pelayanan dasar Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan Dasar	Masih adanya anak putus sekolah	Optimalisasi beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu
		Belum ada anggaran jasa kerja tim pendataan sekolah	Penganggaran dalam APBD
		Banyak gedung bangunan sekolah yang rusak	Penganggaran dalam APBD
2.	Pendidikan Kesetaraan	Kurikulum sekolah yang masih mengandalkan kemampuan akademis	Pembinaan warga belajar sesuai minat, bakat dan kreatifitas berbasis ekonomi kreatif

		Beberapa program/kegiatan terbentur protokol kesehatan covid-19	Beberapa kegiatan dapat terlaksana melalui daring
3.	Pendidikan anak usia dini	Kurangnya guru PAUD yang berkualifikasi S-1/ D-IV	Pelatihan guru PAUD tingkat dasar, lanjut dan mahir

2. Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan meliputi :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Target Capaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator SPM	Target (%)	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2020
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan

Penerapan SPM bidang kesehatan diperuntukkan dalam pemberian layanan kesehatan dasar pada penerima sasaran yang berhak mendapatkan layanan SPM. Pemenuhan mutu layanan dasar dicapai melalui pemenuhan jumlah standar barang/jasa layanan kesehatan yang diberikan. Berikut ini adalah realisasi capaian SPM bidang kesehatan tahun 2020 :

No	Indikator/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			**83,74%**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		26. 173	**23.033**	**3.140**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	*Jumlah total yang terlayani*	*Yang belum terlayanai*	*Persentase capaian 100%*
	a. Vaksin Tetasus Difetri (Td)	26.173	23.033	3.140	88.00%
	b. Tablet Tambah Darah	26.173	23.033	3.140	88,00%
	c. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	26.173	17.456	8.717	66,69%
	d. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	26.173	23.033	3.140	88.00 %
	e. Buku KIA	26.173	23.033	3.140	88.00 %
2.	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehata**			**90.45%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	*yang belum Terlayani*	
		24.984	**22.598**	**2.386**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Formulir Photograf	24.984	22.598	2.386	**90.45 %**
	b. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	24.984	22.598	2.386	**90.45 %**
	c. Buku KIA	24.984	22.598	2.386	**90.45 %**
3.	**Pelayanan kesehatan bayi baru lahir**	**Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan**			**92.97%**

	Jumlah yang Harus Dilayani :	Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
		23.794	**22.122**	**1.672**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	a. Vaksin Hepatitis BO	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	b. Vitamin K1 Injeksi	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	c. Salep/Tetes Mata Antibiotik	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	d. Formulir Bayi Baru Lahir	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	e. Formulir MTBM	23.794	22.122	1.672	**92,97 %**
	f. Buku KIA	23.794	22.122	1.672	**92,97 %**
4.	**Pelayanan kesehatan balita**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			**70,55%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
		118. 291	**88.950**	**29.341**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	118.291	88.950	29.341	75,20 %
	b. Formulir DDTK	118.291	88.950	29.341	75,20 %
	c. Buku KIA	118.291	88.950	29.341	75,20 %
	d. Vitamin A Biru	23.691	13.978	9.713	59,00 %
	e. Vitamin A Merah	118.291	72.158	**46.133**	61.00 %
	f. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell	23.691	15.716	7.975	66.34 %
	g. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella	23.700	16.202	7.498	68.36 %
	h. Jarum Suntik dan BHP	118.291	64.623	53.668	54.63 %
	i. Peralatan Anafilaktik	37	37	0	100 %
5.	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			**52.52%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		212.305	**125.981**	**86.324**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	a. Buku Raport Kesehatanku	212.305	122.446	86.324	59.34 %
	b. Buku Pemantauan Kesehatan	212.305	122.446	86.324	59.34 %
	c. Kuesioner Skrining Kesehatan	212.305	122.446	86.324	59.34 %
	d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah	2.000	846	1.154	42,3 %

	dan Remaja di Dalam Sekolah				
	e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2.000	846	1.154	42,3 %
6.	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**	**Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			**94.92%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		996.173	**142.683**	**853.490**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	1. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	344	309	35	**89.83 %**
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	344	344	0	100.00 %
7.	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**	**Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			22.68%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		229.118	**51.958**	**177.160**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	a. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	229.118	51.958	177.160	22.68 %
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	229.118	51.958	177.160	22.68 %
	c. Buku Kesehatan Lansia	229.118	51.958	**177.160**	**22.68 %**
8.	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**			**96,61 %**
	Jumlah yang Harus	**jumlah total*	**jumlah total*	**yang belum*	

	Dilayani :	*yang harus dilayani*	*yang Terlayani*	*Terlayani*	
		438.654	**47.063**	**391.591**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	a. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	344	344	0	100 %
	b. Tensimeter	344	309	35	89,83 %
	c. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	344	344	0	100 %
9.	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**	**Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan**			**57.08%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		31.858	**15.308**	**24.474**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	a. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	31.858	15.308	16.550	48,05 %
	b. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	344	344	0	100 %
	c. Pedoman dan Media KIE	31.858	7.384	24.474	23,18 %
10.	**Pelayanan kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**	**Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan**			**100 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		3.022	**3.399**	**0**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yangTerlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
	Media KIE	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
11.	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**	**Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan**			**100 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	

		dilayani			
		15903	**5098**	**10804**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	37	37	0	100 %
	Reagen Zn TB	15.903	35.000	-19.097	220,08 %
	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	15903	20.000	-4.097	125,76 %
	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	15.903	10.000	5.903	62,88 %
	Catridge Tes Cepat Molekuler	15.903	5.000	10.903	31,44 %
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	45	45	0	100 %
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	45	45	0	100 %
12.	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)**	**umlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan**			**92,05%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**29.974**	**22.574**	**7.400**	
	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	37	37	0	100 %
	Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	29.642	22.574	7.068	76.16 %
	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	37	*37*	0	100 %
Total Capaian SPM Bidang Kesehatan				**79,38%**	

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	361.925.000	288.585.000	79.74 %

2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5395783000	4279548495	79,31 %
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	45.280.000	28.800.000	63.60 %
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	214.485.000	129.475.000	60.37 %
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.855.000	38.050.000	43.31 %
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	104.355.000	72.425.000	69.40 %
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86.150.000	7.725.000	8.97 %
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.685.000	13.560.000	99.09 %
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.145.000	15.005.000	92.94 %
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	133.695.000	91.245.000	68.25 %
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	131.457.000	32.436.000	24.67 %
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	345.772.500	69.904.000	20.22 %
13.	Bantuan Operasional Kesehatan	38.220.178.000	26.652.634.133,59	69,73%
Total		**45,156,765,500**	**31,719,392,628**	**70.24 %**

Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian	
			Kinerja	Anggaran
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	83,74 %	79,47%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	90,45%	79,31%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	92,97%	63,60%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	70,55%	60,37%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	52,25%	43,31%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	94,92%	69,40%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	22,68%	8,97%
8.	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara penderita	96,61%	99,09%

	penderita hipertensi	hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	57,08%	92,94%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	68,25%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	24,67%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	92,05%	20,22%
Total Perbandingan Capaian Bidang Kesehatan			**79,38 %**	**70,24 %**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian pada tahun 2020 adalah sebesar 79,38 %. Capaian kinerja tertinggi adalah pada layanan kesehatan orang dengan tuberculosis dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Kinerja pelayanan kesehatan orang dengan penyakit tuberculosis mencapai kinerja melebihi target, hal ini sebagai langkah preventif dalam menghadapi pandemi covid 19 dimana orang dengan penyakit TB merupakan orang yang memiliki resiko sangat tinggi terhadap serangan covid 19 sehingga perlu mendapatkan layanan kesehatan ekstra.

Dukungan Personil Bidang Kesehatan

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberian layanan kesehatan khususnya layanan dasar kesehatan sebagaimana termaktub dalam layanan SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri didukung oleh kelembagaan serta personil kesehatan. Guna menunjang pelayanan kesehatan Kabupaten Kediri terdapat 2 Rumah Sakit,UPTD laboratorium Kesehatan, UPTD BPFAK dan 37

UPTD Puskesmas. Dari 37 Puskesmas di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi tahun 2018, terdiri terdapat 3 puskesmas yang dengan tingkat kelulusan paripurna, 18 puskesmas lulus utama, 14 puskesmas lulus madya dan 2 puskesmas lulus dasar. Personil kesehatan pendukung sebagai berikut :

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	1.283	Orang
	Tenaga kontrak	860	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	29	Orang
	Sarjana (S1)	712	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	790	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)		Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	22	Orang
	SLTA	584	Orang
	SLTP	5	Orang
	SD	1	Orang
Pangkat dan Golongan (PNS)	Pembina Utama Muda (IV c)	4	Orang
	Pembina Tingkat I(IV b)	44	
	Pembina (IV a)	3	Orang
	Penata Tingkat I (III d)	332	Orang
	Penata (III c)	124	Orang
	Penata Muda Tk. I (IIIb)	206	Orang
	Penata Muda (III a)	174	Orang
	Pengatur Tingkat I (II d)	208	Orang
	Pengatur (II c)	169	Orang
	Pengatur Muda Tk. I (II b)	16	Orang
	Juru Tingkat I (I d)	2	Orang
	Juru Muda Tk. I (I b)	1	Orang
Pejabat Struktural	Eselon III	4	Orang
	Eselon IV	57	Orang
Struktur Organisasi	Sekretariat	1	Sekretariat
	Bidang	4	Bidang
	Sub Bagian	3	Sub Bag
	Sub Bidang/Seksi	12	Seksi
Jumlah Jabatan Fungsional	Dokter	48	Orang
	Dokter gigi	41	Orang
	Perawat	188	Orang

	Bidan	352	Orang
	Pranata Laboratorium Kesehatan	30	Orang
	Nutrisionis	31	Orang
	Apoteker	13	Orang
	Asisten apoteker	33	Orang
	Perawat gigi	43	Orang
	Sanitarian	37	Orang
	Fisioterapist	1	Orang
	Teknis elektromedis	1	Orang

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 83,74 % dari target SPM 100%. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Ibu hamil enggan atau takut ke puskesmas (FKTP) karena takut tertular covid-19;
2. Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dari POGI dan kelas ibu hamil;
3. Masyarakat datang untuk memeriksakan kehamilannya diusia kandungan lebih dari 12 minggu;
4. Ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri ;
5. Mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga sulit untuk dipantau

Solusi :

a. Sweeping ibu hamil oleh petugas ditingkatkan dengan protokol kesehatan;
b. Perbaikan alur tatalaksana pelayanan maternal, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi;
c. Mengaktifkan Posyandu Ibu hamil dan kelas Ibu hamil dengan protokol kesehatan;

d. Meningkatkan Kepedulian masyarakat melalui program Peduli Keluarga;
e. Mengaktifkan Desa P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komlikasi);
f. Meningkatkan jejaring dengan Fankes di wilayah kerja Puskesmas;
g. Meningkatkan peran dari Pj KIA.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian kinerja Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 90,45% dari target capaian SPM 100%. Hal ini dikarenakan masih ada Ibu melahirkan di luar fasilitas kesehatan yang ada yaitu sebanyak 11 ibu, dan 3 orang ibu bersalin di dukun bayi tradisioanal.

Solusi :

Dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kesadaran Ibu untuk bersalin pada Faskes. Hal ini dapat dilakukan melalui :

a. Pemberian bimbingan dan penyuluhan termasuk pada keluarga untuk memberikan dukungan pada Ibu untuk bersalin pada Faskes yang ada.
b. Meningkatkan Jejaring Fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan menyiapkan sarana prasarana.
c. Mekasanakan screening covid sesuai panduan sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di Rumah sakit dan
d. Melakukan kegiatan Kemitran antara Bidan dan Dukun.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang

mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Capaian saat ini 92,27%, belum sesuai dengan dari target yang diharapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan:

1. Masyarakat enggan membawa bayinya ke fasyankes.
2. Ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk pelindung diri.
3. Adanya bayi yang meninggal pada usia 0-28 hari yaitu sebanyak 162 bayi.

Solusi :

1. Dilakukan upaya promotif pemberian layanan kesehatan bayi baru lahir guna meningkatkan kesadaran Ibu dan keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.
2. Dilakukan sosialisasi melalui berbagai media termasuk media sosial.
3. Melakukan kunjungan bayi melalui daring untuk tetap memantau kesehatan bayi baru lahir.

<u>Pelayanan Kesehatan Balita</u>

Capaian Pelayanan kesehatan balita sebesar 70,55% jauh dari target capaian SPM 100%. Permasalahan yang dihadapi :

a. Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi dasar dan lanjutan usia 18-24 bln.
b. Kurangnya jam buka posyandu atau posyandu belum berfungsi sebagaimanan mestinya, didukung dari Surat Edaran Bupati yang menghentikan operasional Posyandu di era pandemi.
c. Selama masa pandemi Masyarakat enggan ke Posyandu

d. Kurangnya sarana dan prasarana terutama APD bagi petugas

Solusi :

a. Maksimalkan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan pada balita sehat sesuai usianya dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Gugus Covid dalam penyelenggaraan Posyandu;
b. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Balita;
c. Kunjungan ke rumah pada balita yang berisiko;
d. Melengkapi petugas kesehatan dengan APD yang lengkap;
e. Meningkatkan Kerjasama dengan Guru TK dan PAUD dalam pemantauan; dan
f. Melatih guru TK dan PAUD dalam pelaksanaan SDI/TK.

<u>Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar</u>

Capaian kinerja Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 51,52% dari target SPM 100%.

Permasalahan :

1. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan pandemi covid 19, dimana pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan secara daring dari rumah.

Solusi :

1. Melakukan inovasi pemberian layanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar melalui pemberian layanan screening kesehatan secara non tatap muka menggunakan aplikasi; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kemenag dan lintas sektor.

<u>Pelayanan Kesehatan Usia Produktif</u>

Capaian Pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 94,92 % dari target SPM 100 %. Capaian ini sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan kembali.

Permasalahan :

1. Kemauan dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan screening kesehatanya masih sangat rendah;
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan Posbindu yang ada di masyarakat tidak berjalan; dan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk deteksi dini penyakit tidak menular di Posbindu.

Solusi :

a. Advokasi kepada Desa supaya bisa membantu dalam pengembangan Posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakan masyarakat untuk deteksi dini penyakit tidak menular dengan protokol kesehatan;
b. Refresing kader Posbindu yang sudah terbentuk ataupun belum terbentuk;
c. Monitoring pelaksanaan kegiatan screening usia produktif lewat FKTP, Jaringan dan Jejaring dalam masa pandemi covid-19; dan

<u>Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut</u>

Capaian Pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 22,68% jauh dari target SPM sebesar 100%

Permasalahan :

a. Kondisi pandemi covid-19 membuat masyarakat takut dan enggan datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri, apalagi untuk lansia yang merupakan golongan resiko tinggi; dan

b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat (Lansia) di wilayah yang masih kurang peduli terhadap kesehatannya.

Solusi :

a. Meningkatkan Kerjasama dengan DPMPD dan Bappeda untuk sosialisasi penggunaan dana Desa untuk membantu pembiayaan Posyandu Lansia;
b. Melakukan sosialisasi Kesehatan Usia Lanjut sesuai Surat Edaran Bupati dan optimalisasi posyandu lansia; dan
c. Kunjungan ke rumah lansia dengan protokol kesehatan

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 96,61% dari target SPM 100 %. Permasalahan sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk mememeriksakan kesehatan secara rutin ke Posbindu (pos binaan terpadu);
b. Meskipun sudah terdeteksi menderita tekanan darah tinggi, namun pasien tidak mau datang ke tempat pelayanan kesehatan karena merasa tidak ada keluhan dan merasa sehat sehat saja;
c. Masa pandemi Covid-19 masyarakat banyak yang merasa takut untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan.

Solusi :

a. Advokasi kepada Desa supaya bisa membantu dalam pengembangan Posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakan masyarakat untuk Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dengan protokol kesehatan.

b. Meningkatkan SDM Petugas Puskesmas Pengelola PTM

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus sebesar 57, 08 % dari target SPM 100 %. Indikator capaian SPM adalah jumlah penderita Diabetes Melitus yang dilayani sesuai standar sebanyak 15.308 Orang yang dilayani dari target sejumlah 31.858 Orang.

Permasalahan :

1. Masyarakat belum memahami tentang penyakit Diabetes Melitus dan masyarakat belum paham pentingnya melakukan deteksi dini penyakit PTM (DM); dan
2. Sarana dan prasarana untuk deteksi dini penyakit tidak menular belum semua Desa mempunyai Posbindu kit.

Solusi :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit diabetes militus dan kesdaranan deteksi dini diabetes meiitus;
2. Melengkapi sarana prasarana untuk deteksi dini diabetes melitus melalui Posbindu Kit; dan
3. Memperluas cakupan desa yang memiliki Posbindu.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai target SPM. Presentase ODGJ berat yang ditangani sesuai standart sudah mencapai target 109,25% dari target kasus ODGJ berat sejumlah 3.315 orang dan ditangani sesuai standart sejumlah 3.302 orang. Di Kabupaten Kediri masih ada ODGJ berat yang di pasung dari kasus pasung sejumlah 175 Orang. Untuk bebas pasung tahun 2020 masih belum bisa tercapai masih 14,3% yang belum bebas pasung karena ada beberapa kendala masih tingginya stigma masyarakat tentang ODGJ dan pembebasan pasung berbasis

masyarakat masih belum bisa dilaksaksanakan secara maksimal.

Untuk ODGJ berat yang sudah membaik di fasilitasi dengan pembentukan Posyandu Jiwa supaya ODGJ bisa mandiri dan produktif. Jumlah Posyandu Jiwa yang ada di Kabupaten Kediri sejumlah 26 Posyandu yang tersebar di 26 Puskesmas di wilayah Kabupaten Kediri.

Untuk tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19 posyandu jiwa tidak dilaksanakan. Untuk memantau perkembangan ODGJ (Kepatuhan minum obat, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari hari) dilakukan kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh Kader Jiwa, Bidan Desa dan Perawat Jiwa.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuber Culosis (TB)

Pelayanan kesehatan orang dengan TB telah mencapai target target SPM 100 %.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Capaian Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus sebesar 92 % dari target SPM 100 %. Permasalahan sebagai berikut :

a. Kemampuan Petugas dalam menggali faktor resiko HIV pasien yang terbatas; dan
b. Adanya stigma buruk tentang HIV sehingga masyarakat / penderita enggan memeriksakan diri ke Faskes.

Solusi :

menambah layanan CST dan konseling terhadap ODHA untuk akses layanan CST.

3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh DPUPR yang

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabupaten atau Kota Terdiri atas:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik .

Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100%	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2020

Realisasi capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1.	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari**			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**50%**
		960	**960**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	960	960	0	100%

	b. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	0	0	0	0%
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestic**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**0%**
		0	**0**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	0	0	0	0%
	b. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	0	0	0	0%
	c. Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masayarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	0	0	0	0%
Total Capaian Bidang Pekerjaan Umum				**25%**	

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	71.459.000	71.459.000	100%
	b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	927.042.000	927.042.000	100%
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
Total		**998.501.000**	**998.501.000**	**100%**

Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian	
			Kinerja	Anggaran
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	50%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0	0%
Total Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Bidang Pekerjaan Umum			50%	100%

Dukungan Personil Bidang Pekerjaan Umum

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum, termasuk dalam rangka penerapan pelayanan SPM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibantu oleh 33 PNS dan 22 Tenaga Kontrak sebagaimana data berikut :

NO.	STATUS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				
			SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2
1	PNS	33	1	6	1	18	7
2	NON PNS/TENAGA KONTAK	22		10		12	
	JUMLAH TOTAL	**55**	**1**	**16**	**1**	**30**	**7**

Untuk rincian pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh :

1. 1 (satu) Sekretaris
2. 2 (dua) Kasubag
3. 3 (tiga) Kepala Bidang
4. 8 (delapan) Kepala Seksi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Waktu pelaksanaan kegiatan sering tidak tepat waktu, karena pemberdayaan dan dikerjakan oleh masyarakat.	Serah terima menyesuaikan, hasil pekerjaan.
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Pada Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Kediri telah menganggarkan feasibility study untuk kegiatan pembangunan SPALD-S dan SPALD-T, namun berkenaan dengan pandemic covid-19 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana	Pengajuan penganggaran kembali di tahun 2021

u

mahan Rakyat

Penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Perumahan Rakyat pada Kabupaten atau Kota Terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terget Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	2020
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2020

Realisasi capaian SPM Bidang Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	**Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni**			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**0 %**
		0	**0**	**0**	
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	*jumlah total yang harus dilayani
	a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	b. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	c. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0	0%
	d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi**			**Total Pencapaian**

		penyediaan rumah yang layak huni			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	0%
		0	0	0	
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	*jumlah total yang harus dilayani
	a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	0
	b. Subsidi Uang Sewa	0	0	0	0
	c. Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	0
Total Capaian Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat				0 %	

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
2.	Sosialisasi dan persiapan Pemyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-
3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	-	-	-
4.	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-
Total		-	-	-

Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan rakyat, termasuk dalam rangka penerapan pelayanan SPM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibantu oleh 33 PNS dan 22 Tenaga Kontrak sebagaimana data berikut :

NO.	STATUS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				
			SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2
1	PNS	33	1	6	1	18	7
2	NON PNS/TENAGA KONTAK	22		10		12	
	JUMLAH TOTAL	**55**	**1**	**16**	**1**	**30**	**7**

Untuk rincian pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh :

a. 1 (satu) Sekretaris
b. 2 (dua) Kasubag
c. 3 (tiga) Kepala Bidang
d. 8 (delapan) Kepala Seksi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Tidak ada kejadian bencana yang mengharuskan relokasi dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam yang terjadi pada Tahun 2020	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Tidak ada kegiatan pemerintah kabupaten yang berdampak pada relokasi rumah layak huni untuk warga pada Tahun 2020	-

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Penyelenggaraan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Satpol – PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satpol - PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran), serta BPBD mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kabupaten atau Kota terdiri atas:

a. pelayanan kerugian materil; dan
b. pelayanan pengobatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Daerah pada kabupaten atau kota terdiri atas:

a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah pada kabupaten atau kota terdiri atas :

a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100%	2020
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2020
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan informasi rawan bencana	100%	2020
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2020
5	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2020
6	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2020

Realisasi capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	91.61%
		5.020	4.599	421	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	5.020	4.599	421	91.61%
	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	5.020	4.599	421	91.61%
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			Total Pencapaian
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	89.07%
		5020	4599	421	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Penegakan Perda sesuai SOP	5.020	4.599	421	91.61%
	b. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	5.020	4.217	803	84.00 %
	c. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	5.020	4.599	421	91.61%

3	**Pelayanan informasi rawan bencana**				**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**66.48%**
		442.356	**442.356**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0	100%

	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	442.356	442.356	0	100%
	c. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	57.262	57.262	0	100%
	d. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0	0%
	e. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0%
4	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**				**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**94,68%**
		4.139	**3.919**	**220**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.139	3.919	220	94,68%
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	20.416	20.416	0	100%
5	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**				**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**100%**
		58.805	**58.805**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	18.258	18.258	0	100%

	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	31.898	31.898	0	100%
	d. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	371	371	0	100%
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2	2	0	100%
	f. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	166.318	166.318	0	100%
6	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**50%**
		61	**36**	**25**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	61	61	0	100%
	b. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	0	0	0	0
Total Capaian Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				**81,97%**	

Berdasarkan tabel 2.18 di atas, penerapan SPM untuk sub urusan kebencanaan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan langkah-langkah untuk mitigasi resiko penyebaran covid-19 secara lebih luas serta langkah penanganan dan penyelamatan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam pandemi covid 19. Identifikasi dan pemetaan warga di daerah rawan bencana dan berpotensi menjadi bencana terutama di 6 (enam) kecamatan rawan bencana alam yaitu kecamatan mojo, semen, puncu, kepung, tarokan dan wates (data dukung sebagaimana lampiran).

Penanganan bencana alam dan pandemi covid -19 dilakukan melalui berbagai kegiatan, pemberian layanan penyelamatan dan evakuasi koban bencana total untuk 19.258 warga meliputi : 10.000 orang korban dan warga terdampak banjir, 8.000 orang korban dan terdampak tanah longsor, isolasi pasien covid19 sebanyak 170 orang, serta

rujukan pasien covid-19 ke rumah sakit sebanyak 1.088 orang. Kasus konfirmasi positif covid-19 Kabupaten Kediri tahun 2020 sebanyak 2.416 kasus.

Pemberian layanan respon cepat untuk bencana alam banjir dan tanah longsor kepada 31.898 orang korban dan warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor selama tahun 2020. Aktivasi posko bencana sebanyak 371 posko, terdiri dari 1 pokso pusat kabupaten, 26 posko kecamatan, serta 344 posko satgas covid desa.

Pemberian layanan respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas yaitu penangan pandemi covid-19 mampu melayani 166.318 orang. Isolasi pasien covid-19 di tempat isolasi sebanyak 170 pasien, layanan rujukan pasien covid ke rumah sakit sebanyak 1.088 pasien, layanan untuk 2.416 pasien terkonfirmasi positif covid-19, pemberian alat pengaman diri (APD) untuk petugas penanganan covid-19 sebanyak 43.000 hazmat, pemberian 143.350 boks masker atau setara dengan 7.167.500 psc masker untuk 119.458 warga, serta bantuan pemakaman pasien covid meninggal sebanyak 186 pasien.

Kegiatan desinfeksi lingkungan guna mencegah penyebaran covid-19 dilaksanakan pada failitas umum, pondok pesantren , kantor pemerintah, sekolah-sekolah, rumah ibadah, sarana prasarana publik dapat menjangkau kurang lebih 17.156 warga penerima manfaat. Berbagai langkah mitigasi, pencegahan dan penanganan covid-19 Pemerintah Kabupaten Kediri menjadi bagian dari pelayanan dasar (SPM) sub urusan kebencanaan.

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	40.300.000	18.825.000	
	Jumlah	**40.300.000**	**18.825.000**	**46.71 %**
2.	**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**			
	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	415.625.000	283.275.000	**68.16 %**
	b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.075.000	35.000.000	68,55 %
	c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
	d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	69.250.000	17.280.000	24,95 %
	Jumlah	**470,700,000**	**318,275,000**	**67,62 %**
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
	a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	4.363.107.273	2.487.903.639	57.02 %
	b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	161.0664.000	881.658.000	54,74%
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	56.800.000.000	56.800.000.000	100 %
	Jumlah	**62,773,771,273**	**60,169,561,639**	**95,85 %**
4.	**Kegiatan Lainya**			
	a. Penyiapan pengendalian bahaya kebakaran	223.640.250	170.259.814	76,13%
	b. Obstip penegakan pelanggaran Perda/Perbup	1.862.637.500	1.504.535.508	80,77 %
	c. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (manajemen	69.200.000	18.280.000	26,42 %

	logistik)			
Jumlah		**2,155,477,750**	**1,693,075,322**	**78,55 %**

Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian	
			Kinerja	Anggaran
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	91,61%	80,77%
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	89,07%	80,77%
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan informasi rawan bencana	66,48%	46,71%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	94,68%	67,62%
5	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	100%	95,85%
6	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	50%	76,13%
Total			**81,97%**	**95,05%**

Dukungan Personil Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum serta Sub Urusan Kebakaran, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri dibantu oleh 66 PNS dan 145 Tenaga Kontrak sebagaimana data berikut :

I		**STATUS KEPEGAWAIAN**	
	1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	66
	2	Tenaga Kontrak	145
II		**JENJANG PENDIDIKAN**	
	1	Sarjana Strata 2 (S2)	7
	2	Sarjana Strata 1 (S1)	15
	3	Diploma IV (D IV)	0
	4	Diploma III (D III)	5
	5	Diploma II (D II)	0
	6	Diploma I (D I)	0
	7	SMA/SMK	31
	8	SLTP	8
		JUMLAH	66

dari 66 PNS Kepala Satpol-PP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1. 1 (satu) Sekretaris;
2. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian;
3. 5 (lima) Kepala Bidang; dan
4. 10 (sepuluh) Kepala Seksi.

Sementara untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri dibantu oleh 12 PNS, 8 Tenaga Kontrak dan 13 Pusdalops. Dengan formasi struktural sebagai berikut :

1. 1 (1) Kepala Pelaksana; dan
2. 3 (tiga) Kepala Seksi

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	✓ Jumlah satpol pp yang kurang memadai dibanding jumlah penduduk kabupaten kediri.	✓ Penambahan PNS satpol PP ✓ Peningkatan SDM satpol PP melalui Diklat ✓ Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat PPNS
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	✓ Kualitas dan Kuantitas SDM satpol PP dibidang penindakan pelanggaran Perda masih minim	✓ Penambahan PNS satpol PP. ✓ Peningkatan SDM satpol PP melalui Diklat. ✓ Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat PPNS.
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pembuatan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana tidak terlaksana karena ada refocusing anggaran covid 19	Pemberitahuan informasi secara rutin, rawan bencana lewat whatsaapp grup TSBD di Kabupaten Kediri
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana), pendidikan rawan bencana dengan media boneka tobong, pembentukan sekolah siaga bencana, jambore Tim Siaga Bencana Desa tidak terlaksana karena ada refocusing.	Pemberitahuan informasi secara rutin, rawan bencana lewat whatsaapp grup TSBD di Kabupaten Kediri
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Dengan cakupan luas wilayah kabupaten kediri dibandingkan SDM pelayanan sangat kurang.	Pengadaan bantuan tenaga lewat Unit Reaksi Cepat dari tiap kecamatan

6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	✓ Kurangnya sarana dan prasarana, keahlian bagi personil PMK sehubungan dengan alih fungsi Bidang PMK yang tidak hanya menangani kebakaran akan tetapi bertambah menjadi rescue (penyelamatan) secara luas. ✓ Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang hanya 1 dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kediri.	✓ Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan pengadaan sesuai skala prioritas kebutuhan. ✓ Mengadakan peningkatan kualitas keahlian dan pengetahuan bagi petugas PMK dengan mengirimkan diklat atau pelatihan. ✓ Secara bertahap menambahkan WMK dan menjalin kerjasama yang baik dengan Instansi terdekat yang mempunyai Tim PMK.

6. Bidang Sosial.

Penyelenggaraan SPM bidang sosial di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaarl sosial dan penanganan fakir miskin.

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Sosial pada Kabupaten atau Kota Terdiri atas :

a. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti ;
b. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandagan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban benacana Kabupaten/ Kota.

Target Capaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warnga negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%	2020
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2020
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2020
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandagan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	2020
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca	Jumlah warga negara korban bencana kab yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2020

Realisasi capaian SPM Bidang Sosial

Penerapan SPM bidang sosial diperuntukkan dalam pemberian layanan sosial dasar pada penerima sasaran yang berhak mendapatkan layanan SPM. Pemenuhan mutu layanan dasar dicapai melalui pemenuhan jumlah standar barang/jasa layanan sosial yang diberikan. Pengukuran kinerja berdasarkan capaian indikator di dalam SPM bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah realisasi capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kediri Tahun 2020 akan disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	**Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**46,63 %**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		184	**184**	**0**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	12	12	0	100 %
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	0 %
	e. Penyediaan Permakanan	102	102	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	g. Penyediaan Alat bantu	9	9	0	100 %
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	51	51	0	100 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Ana	0	0	0	0 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	4	4	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4	4	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	15	15	0	100 %
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**53,33 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total*	**jumlah total*	*yang belum*	

		yang harus dilayani	*yang Terlayani*	*Terlayani*	
		58	**58**	**0**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	47	47	0	100 %
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Pant	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	47	47	0	100 %
	e. Penyediaan Permakanan	47	47	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	g. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0 %
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	47	47	0	100 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	9	9	0	100 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	47	47	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	47	47	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	2	2	0	100 %
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**46,57 %**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		173	**173**	**0**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	6	6	0	100 %
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan	0	0	0	0 %

	Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti				
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	12	12	0	100 %
	e. Penyediaan Permakanan	100	100	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	**0 %**
	g. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	**0 %**
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	0 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Ana	0	0	0	0 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	38	38	0	100 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	12	12	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12	12	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	17	17	0	100 %
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**40 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	*yang belum Terlayani*	
		191	**191**	**0**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	66	66	0	100 5
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Pant	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %

	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	35	35	0	100 %
	e. Penyediaan Permakanan	35	35	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	g. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0 %
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	90	90	0	100 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandanngan dan pengemis terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	35	35	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35	35	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	0	0	0	0 %
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**			**20 %**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		61.278	**61.278**	**0**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Penyediaan Permakanan	61.278	61.278	0	100 %
	b. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	c. Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	0	0 %
	d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	0	0 %
	E. Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0	0 %
Total					

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi atau masyarakat terkena bencana. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.

Pada tahun 2020 Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah, penganan perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Kediri diberikan kepada masyarakat yang terkena dan terdampak covid-19 yang merupakan bencana non alam.

Capaian kinerja Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten Kediri tahun 2020 sebesar 20% dari target SPM 100 %. Hal ini karena yang menjadi prioritas pemberian jaminan dan perlindungan sosial akibat pandemi covid-19 hanyalah pemberian bantuan beras/permakanan untuk masyarakat terdampak covid, sedangkan 4 (jenis) layanan lain (penyediaan sandang, tempat penampungan pengungsi, penganganan khusus bagi kelompok rentan pelayanan psikososial) tidak dapat dilakukan karena layanan tersebut tidak diperlukan/tidak menjadi prioritas .

Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial tahun 2020 untuk menangani masyarakat terkena dan terdampak covid-19 Kabupaten Kediri dilakukan melalui pemberian layanan :

1. Pemberian bantuan sembako kepada 61.278 kepala keluarga terdampak covid 19 di 26 Kecamatan, sebesar @ 10 Kg/KK selama 8 (delapan) bulan.

Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas**	**160,800,000**	**160,800,000**	**100 %**
	b. Penyediaan permakanan	91.800.000	91.800.000	100 %
	c. Penyediaan alat bantu	25.700.000	25.700.000	100 %
	d. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	43.300.000	43.300.000	100 %
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**33.925.000**	**33.925.000**	**100 %**
	e. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	33.925.000	33.925.000	100 %
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**97,325,000**	**97,325,000**	**100 %**
	d. Penyediaan permakanan	90.000.000	90.000.000	100 %
	e. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6.625.000	6.625.000	100 %
	f. Layanan rujukan	700.000	700.000	100 %
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**37,195,000**	**37,195,000**	**100 %**
	d. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	15.645.000	15.645.000	100 %
	e. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	21.550.000	21.550.000	100 %
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**	**48.525.000.000**	**46.312.310.438**	**95,44 %**
	a. Penyediaan permakanan (bantuan beras masyarakat terdampak covid.19 untuk 61.278 KK selama 8 bulan)	48.525.000.000	46.312.310.438	95,44 %
Total Anggaran Pelayanan Bidang Sosial		**48,854,245,000**	**46,641,555,438**	**95.47 %**

Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian	
			Kinerja	Anggaran
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warnga negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	46,67 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	53,33 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	46,67 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandagan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	40 %	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca	Jumlah warga negara korban bencana kab yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	20 %	95,44 %
Total Perbandingan Capaian Kinerja dan Angaran Bidang Sosial			**41,33 %**	**95,47 %**

Dari tabel di atas, realisasi kinerja penerapan SPM Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 41,33 % dan realisasi anggaran sebesar 95,47 %. Perbandingan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tampak kurang berimbang, hal ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penghitungan kinerja SPM dan realisasi anggaran SPM Sosial sebagaimana tabel di atas dihitung berdasarkan aplikasi spm.bangda.kemendagri. Di dalam aplikasi, perhitungan kinerja berdasarkan “pemenuhan seluruh” unsur mutu layanan yang ada, namun perhitungan persentase serapan anggaran hanya berdasarkan “sebagian unsur” mutu layanan yang telah dianggarkan. Pada penghitungan capaian kinerja, ketika salah satu unsur mutu layanan tidak terisi, maka otomatis akan mengurangi persentase capaian

kinerja, namun pada penghitungan serapan/capaian anggaran ketika salah satu/lebih unsur pembiayaan layanan tidak teranggarkan atau tidak ada realisasi, hal ini tidak masuk ke dalam perhitungan capaian realisasi anggaran di dalam aplikasi SPM.Bangda. Hal ini menyebabkan terjadi 'tidak balance" antara capaian kinerja dan serapan anggaran.

Dukungan Personil Bidang Sosial

Dalam pelaksanaan pemberian layanan dasar bidang sosial sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 , Dinas Sosial Kabupaten Kediri didukung oleh personil sebagai berikut :

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	29	Orang
	Tenaga kontrak	11	Orang
	TKSK		Orang
	PSM		Orang
	TAGANA		Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	8	Orang
	Sarjana (S1)	17	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	-	Orang
	SLTA	15	Orang
	SLTP	1	Orang

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2020

Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Orang
Pekerja Sosial Profesional	1	1	2	Orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190	153	343	Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	23	10	33	Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial			56	lembaga

Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK)	19	7	26	Orang
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			1	Lembaga
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)			2	Lembaga

Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial

Capaian keberhasilan Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dapat dilihat dari capaian kinerja yang diraih dibarengi dengan serapan anggaran . Ketidakberhasilan pencapaian target SPM 100% dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kediri;
2. Keterbatasan anggaran sehingga pemberian layanan rehabilitasi sosial hanya diberikan untuk jenis layanan yang menjadi prioritas didasarkan pada asesmen petugas;
3. Kurangnya pemahaman SDM Dinas Sosial terkait SPM Bidang Sosial sesuai regulasi terbaru, sehingga belum seluruh layanan diberikan sesuai jenisnya serta belum seluruh jenis layanan dianggarkan;
4. Tidak adanya mobil resque yang khusus untuk menangani PMKS. Sementara ini hanya terdapat mobil resque untuk penanganan bencana alam;
5. Pemerintah desa kurang menyadari perannya dalam penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan terhadap penanganan PMKS;
6. Kurangnya tempat penampungan sementara/shelter

7. Rendahnya SDM para tuna sosial / gelandangan/ pengemis disertai dengan mentalitas dan kurangnya kesadaran untuk hidup layak;
8. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak-hak anak, rendahnya SDM keluarga dan keterbatasan ekonomi.

Solusi :

1. Penambahan jumlah tenaga untuk menangani PMKS;
2. Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan semua jenis layanan kebutuhan dasar termasuk layanan kedaruratan;
3. Pemberian bimbingan teknis terkait penerapan SPM Bidang Sosial;
4. Penyediaan mobil rescue untuk menangani PMKS;
5. Perlu melakukan sosialisasi terhadap pemerintahan desa, PSM dan keluarga;
6. Membangun rumah penampungan sementara;
7. Pembinaan, pendampingan terhadap tuna sosial, dan
8. Peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,85	72,05	0,278
2	Angka Kemiskinan	10,42%	11,40%	9,405
3	Angka Pengangguran	3,68%	5,24%	42,391
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	-2,41%	-147,535
5	Pendapatan Per kapita	26160000	24840000	-5,314
6	Ketimpangan Pendapatan	0,299	0,325	8,696

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	**Pendidikan**	**Pendidikan PAUD**				
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	706	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	83.247	Dinas Pendidikan	
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	83.247	Dinas Pendidikan	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2.723	Dinas Pendidikan	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD	2.054	Dinas Pendidikan	
		6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.079	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	713	Dinas Pendidikan	
		Pendidikan Dasar				
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	675	Dinas Pendidikan	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	160.603	Dinas Pendidikan	
		3			Dinas Pendidikan	

4	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	73.580	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	160.603	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	73.580	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	9.553	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.637	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.586	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.418	Dinas Pendidikan	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.029	Dinas Pendidikan	
12	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	987	Dinas Pendidikan	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	822	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	408	Dinas Pendidikan	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.173	Dinas Pendidikan	
16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.346	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	827	Dinas Pendidikan	

18	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	188	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	370	Dinas Pendidikan	
20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	161	Dinas Pendidikan	
Pendidikan Menengah Pertama				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	675	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	160.603	Dinas Pendidikan	
3			Dinas Pendidikan	
4	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	73.580	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	160.603	Dinas Pendidikan	
6	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	73.580	Dinas Pendidikan	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	9.553	Dinas Pendidikan	
8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.637	Dinas Pendidikan	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.586	Dinas Pendidikan	
10	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.418	Dinas Pendidikan	
11	Jjumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.029	Dinas Pendidikan	
12	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	987	Dinas Pendidikan	

13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	822	Dinas Pendidikan	
14	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	408	Dinas Pendidikan	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.173	Dinas Pendidikan	
16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.346	Dinas Pendidikan	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	827	Dinas Pendidikan	
18	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	188	Dinas Pendidikan	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	370	Dinas Pendidikan	
20	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazahSMA/sederajat	161	Dinas Pendidikan	
Pendidikan Kesetaraan				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	11	Dinas Pendidikan	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.888	Dinas Pendidikan	
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.888	Dinas Pendidikan	
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	550	Dinas Pendidikan	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	550	Dinas Pendidikan	

		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	550	Dinas Pendidikan	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	33	Dinas Pendidikan	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	33	Dinas Pendidikan	
2	**Kesehatan**	**Rasio daya tampung rumah sakit rujukan**				
		1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	11	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	11	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23.033	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	574	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	22.598	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	492	Dinas Kesehatan	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	132.732	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	750	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	449.527	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	9.183	Dinas Kesehatan	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	371.338	Dinas Kesehatan	

		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	787		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	653	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	787	Dinas Kesehatan	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	155.874	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	787	Dinas Kesehatan	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1.032		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	304		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23.036	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	304	Dinas Kesehatan	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	455	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	37	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	37	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	128	Dinas Kesehatan	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50.648	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	395	Dinas Kesehatan	
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas Perkim	

	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas Perkim dan Dinas PUPR	
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0		tidak ada pantai
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0		tidak ada pantai
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	tidak	Dinas PUPR	
	6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada	Dinas PUPR	Data Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten kediri adalah ada di Laporan 10 O
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		Dinas PUPR	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota				
	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Dinas Perkim	
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)		Dinas Perkim dan Dinas PUPR	
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)			tidak ada pantai

4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)			tidak ada pantai
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		Dinas PUPR	Kewenangan sungai ada di Pusat
6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	tidak	Dinas PUPR	Kabupaten/ Kota tidak mempunyai wilayah sungai
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		Dinas PUPR	Kewenangan sungai ada di Pusat
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		Dinas PUPR	Dinas PUPR tidak mempunyai data jaringan irigasi primer yang mempunyai pusat
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	128,049.34 /174,829 = 73.24 %	Dinas PUPR	
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		Dinas PUPR	Dinas PUPR tidak mempunyai data jaringan irigasi tersier
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)		Dinas Perkim	
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	ada	DLH	
3	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		Dinas Perkim	

4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		Dinas Perkim	
5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		Dinas Perkim	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Dinas Perkim/ Dinkes	
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Dinas Perkim/ Dinkes	
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Dinas Perkim/ Dinkes	
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas Perkim/ Dinkes	
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Dinas Perkim/ Dinkes	
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Dinas Perkim/ Dinkes	
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		Dinas Perkim/ Dinkes	
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		Dinas Perkim/ Dinkes	
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		Dinas Perkim/ Dinkes	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		Dinas Perkim/ Dinkes	
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		Dinas Perkim/ Dinkes	
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		Dinas Perkim/ Dinkes	

13	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD		Dinas Perkim/ Dinkes	
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas Perkim/ Dinkes	
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota				
1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dinas Perkim/ Dinkes	
2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		DPMPTSP	
3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)		Dinas Perkim/Bagian Hukum	
4	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)		Dinas Perkim/Bagian Hukum	
5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Dinas Perkim/Bagian Hukum	
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah		Dinas Perkim/Bagian Hukum	
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Dinas Perkim/Bagian Umum	
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat		Dinas Perkim/Bagian Umum	
Rasio kemantapan jalan				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1224,20 km	Dinas PUPR	
2	Panjang jalan yang dibangun	2055,5 meter	Dinas PUPR	
3	Panjang jembatan yang dibangun	17,50 Meter	Dinas PUPR	
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	16.834,30 Meter	Dinas PUPR	
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPR	
6	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0	Dinas PUPR	
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	91,00 Meter	Dinas PUPR	

8	Panjang jalan yang dipelihara	20.027,33 Meter	Dinas PUPR	
9	Panjang jembatan yang dipelihara	48 Meter	Dinas PUPR	
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	

		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang		Dinas PUPR/Dinas Perkim	

			menjadi kewenangan pengawasannya			
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		DPMPTSP	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP diwilayah kabupaten/kota		DPMPTSP	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR/Dinas Perkim	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	**Pendidikan**	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	64054/64174 = 98,83%	Dinas Pendidikan	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	148174/148941 = 99,79%	Dinas Pendidikan	
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	64348/72652 = 88,57%	Dinas Pendidikan	
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1888/4328 = 43,62%	Dinas Pendidikan	
2	**Kesehatan**	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1090/1580092 = 0,07%	Dinas Kesehatan	
		2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	11/11 = 100%	Dinas Kesehatan	
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	23033/26173 = 88,00%	Dinas Kesehatan	
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	22598/24984 = 90,45%	Dinas Kesehatan	

			5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	21274/23691 = 89,80%	Dinas Kesehatan	
			6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88950/118291 = 75,20%	Dinas Kesehatan	
			7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122446/212305 = 57,67%	Dinas Kesehatan	
			8. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	142683/996173 = 14,32%	Dinas Kesehatan	
			9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	51958/229118 = 22,68%	Dinas Kesehatan	
			10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47063/1225291 = 3,84%	Dinas Kesehatan	
			11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15308/15308 = 100%	Dinas Kesehatan	
			12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3399/3002 = 113,22%	Dinas Kesehatan	
			13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	5090/5090 = 100%	Dinas Kesehatan	
			14. Persentase orang dengan	20634/30014 = 68,75%	Dinas Kesehatan	

			resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota		Dinas Perkim	
			2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		Dinas Perkim	
			3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	25764/34000 = 75,78 %	Dinas PUPR	
			4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Dinas Perkim /Dinkes	Data dari Dinas Kesehatan Tahun 2018 (Updating data tahun 2019 masih proses desk dengan UPTD Puskesmas). Data yang digunakan adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum layak

			5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Dinas Perkim/Dinkes/DLH	jumlah sarana/rumah tangga yang memiliki jamban sehat masing-masing di rumahnya. Di kabupten Kediri belum ada pengolahan limbah tinja secara terpadu.
			6. Rasio kepatuhan IMB kab/kota		Dinas Perkim/DPMPTSP	
			7. Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	1181,24/1224,20 = 96,49%	Dinas PUPR	
			8. Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		Dinas PUPR/Dinas Perkim	
			9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Dinas PUPR/Dinas Perkim	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawaidi luar guru dan tenaga kesehatan	267182969079,61/3303033640237,12 = 8,09 %	BPKAD/Disdik/Dinkes	
		2	Rasio PAD	503.914.212.143,62	BPKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umumexpenditures)	636142304831,92/3303033640237,12 = 19,26%	BPKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan		Inspektorat	
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	3/81 = 3.70 %	Bagian Adm. Pembangunan	
		2	Persentase jumlah pengadaan yangdilakukan dengan metode kompetitif	81/81 = 100%	Bagian Adm. Pembangunan	
		3	Rasio nilai belanja yangdilakukan melalui pengadaan	992,837,511,905/1,041,050,900,274.53 = 95.37 %	Bagian Adm. Pembangunan	
3.	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi danMenegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,829/1,170 = 156.32 %	BKD	

		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	96/2,999 = 3.20 %	BKD	
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	96/96 = 100%	BKD	
4	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2841530818936,92/3303033640237,12 (113,97%)	BPKAD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	436.238.308.520,74	BPKAD	
		3	Manajemen Aset:		BPKAD	
			a. Apakah ada daftar asset tetap?	YA		
			b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	YA		
			c. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	YA		
			d. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	YA		
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	524604345151,62/1876818670363,08 = 27,95%	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan			
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah			

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periode.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD yang telah direvisi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

<u>Capaian Kinerja Tahun 2020</u>

Dalam upaya pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri yang perlu dilakukan adalah dengan melalui pengukuran target kinerja dari

sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja. Untuk mengetahui tingkat prosentase pencapaian masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2020, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Untuk menghitung capaian indikator kinerja sasaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\boldsymbol{Realisasi}}{\boldsymbol{Target}} \boldsymbol{X}\ \mathbf{100\%}$$

Selanjutnya untuk menentukan kategori capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri maka digunakan skala capaian sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	85 keatas	Sangat Berhasil
2	70 ≤ X < 85	Berhasil
3	55 ≤ X < 70	Cukup Berhasil
4	X < 55	Kurang Berhasil

Metode pengukuran kinerja setiap sasaran menggunakan metode degan tahapan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya;
3. Analisa penyebab peningkatan / penurunan , serta solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan capaian kinerja terhadap realisasi anggaran;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2020 pada bab ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai berikut:

PENGUKURAN INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2016 - 2020

TUJUAN				TARGET 2020	REALISASI					CAPAIAN 2020
URAIAN		INDIKATOR			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1	Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama	100%	0	0	0	0	0	100%
2	Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan	1	Nilai Pola Pangan Harapan	89,9	87,90	88,10	88,70	98,30	94,00	104,56
3	Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat	1	Angka kemiskinan	11,75	12,72	12,25	11,31	10,42	11,40	102,98
4	Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal	1	Angka Rata-rata lama sekolah	8,29	7,58	7,65	7,68	8,01	8,02	96,74
			APK							
			SD/MI	109,85	109,72	108,7	107,76	108,07	106,5	96,95
			SMP/MTs	99,80	101,66	103,1	100,95	100,2	102,63	102,84
			APM							
			SD/MI	99,93	99,76	98,88	98,76	99,71	99,79	99,86
			SMP/MTs	80	78,81	81,75	80,53	81,86	88,57	100,71
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	72,59	72,2	72,25	72,37	72,54	72,61	100,03

6	Mengembangkan Kreativitas, Produktivitas Dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah	1	PDRB per kapita (juta rupiah)	19,92	21,36	22,92	24,61	26,17		
		2	Angka pertumbuhan ekonomi	5,66	5,03	5,07	5,17	5,02		
7	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	1	PDRB ADHB (juta rupiah)	48.200.267.386,02	33.211,39	35.789,50	38.598	41.204,90		
8	Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Persentase koperasi sehat	87,50	88,33	87,57	100	100	100	114,29
9	Meningkatnya iklim investasi	1	Persentase nilai investasi	3	27,79	14,43	2,24	80,04	11,15	371,67
10	Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan	1	Crude Birth Rate (CBR)	15,18	17,7	17,3	17	16,8	15,99	92,25
		2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,20	91,99	92,81	91,81	92,7	92,7	100,54

11	Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang professional	1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	-	-	CC	B	B* (Angka Sementara)	B* (Angka Sementara)
12	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan	1	% infrastruktur daerah dalam kondisi baik	94	-	-	84,54	84,99	84,12	89,49
13	Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1	Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi	91	-	10	20	20	20	21,97
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62						
15	Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,75	4,95	3,18	4,25	4,83	5,24	90,65

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi			Capaian 2020	Target Akhir RPJMD tahun 2021	Capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD tahun 2016 – 2021 (%)
			2018	2019	2020			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)

1.	Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100
2.	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	140,40	138,24	153,40	153,60	109,40%	141,80	108,32
3.	Nilai produksi bahan pangan utama	824.500	803.382	804.426	808.539	98,06	826.000	97,88
4.	Prosentase peningkatan produksi peternakan • Daging • Telur • Susu	0,65 0,92 4	4,01% 0,67% 2,56%	4,91% 0,84% 3,61%	-3,96 -14,79 -0,51	-609,23% -1.607,60% -12,75%	0,73% 0,95% 4%	-542,46 -1.556,84 -12,75
5.	Prosentase peningkatan produksi perikanan Kolam Perairan Umum	5,49 5	12,07% 5,12%	8,13% 3,96%	6,07 4,89	110,56 97,80	4,5% 4%	180,66 99
6.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,43	12,86	12,87	13,15	97,92	13,65	94,28
7.	Angka kematian ibu (/100.000 kelahiran)	58,30	72,6	58,29	83,82	83,60	41,64	71,43
8.	Angka kematian bayi (/1000 kelahiran)	7,08	6,8	6,5	71	100	6,87	100
9.	Angka pertumbuhan industry	3.500	2.884	3.343	3.349	95,68	3.550	94,16
10.	Jumlah kunjungan wisata	2.438.611	3.252.052	4.186.008	908.907	93,18	2.680.440	156,16
11.	Prosentase koperasi aktif	70,50	53,4%	53,76%	55,52	78,75	71%	75,71
12.	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	2,93	1,94	11,27	3,37	115,02	3,39	332,44

13.	Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)*	517.830715	Rp. 586.856516	Rp. 2.637,14	Rp.636,142150	122,85	Rp.533.365637	494,43%
14.	Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	72,34	73,93	74,61	72,24	99,86	74,39	100,29
15.	Nilai SAKIP	BB	B	B	B* (Nilai Sementara)	B	A	B
16.	Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	90%	84%			85%	98,82%
17.	Prosentase jalan dengan kondisi baik	93	88,14%	88,86%	86,94%	93,48%	95%	91,51
18.	Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	86	80,95%	81,12%	81,29%	94,52%	89,5%	90,82
19.	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,11	86,77%	99,4%	106,12	120,44	88,50%	119,90%
20.	Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	3,025%	7,62%	17,49	433,25%	4%	433,25%
21.	Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	64	67,70%	71,61%	70,65	110%	67%	105,44%

Kategori penilaian IKU

NO	Interval Nilai Capaian IKU	KATEGORI CAPAIAN
1	100 keatas	Sangat Baik
2	80 ≤ X < 100	Baik
3	60 ≤ X < 80	Cukup Baik
4	X < 60	Kurang Baik

Dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2018 kinerja yang dicapai menunjukan bahwa terdapat 11 (sebelas) IKU dengan kriteria sangat baik, dan 10 (sepuluh) IKU dengan kriteria baik.

Mayoritas dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik (50%) dan yang kriteria baik (50%).

PENGKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	1. Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,50	73,24	90,98
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	1. Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	140,40	153,60	109,40
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	1. Nilai produksi bahan pangan utama (ton)	824.500	808.539	98,06
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	1. Nilai produksi perkebunan	239.380	239.629	100,10
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	1. Prosentase peningkatan produksi peternakan • Daging • Telur • Susu	 0,65 0,95 4	 -3,96 -14,79 -0,51	 -609,23 1.556,84 -12,75

		2. Prosentase peningkatan produksi perikanan • Kolam • Perairan Umum	5,49 5	6,07 4,89	110,56 97,80
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	1. Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	22,73	40,40	177,74
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	1. Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	92	-655	-712
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	1. Jumlah Desa Tangguh Bencana	2	0	0
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	13,43	13,15	97,92
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	1. Angka kematian ibu	68,71	83,82	83,60
		2. Angka kematian bayi	7,5	7,1	100
12.	Meningkatnya sektor industry	1. Angka pertumbuhan industry (unit)	3.500	3.349	95,68
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	1. Jumlah kunjungan wisata	975.444	908.907	93,18
		2. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	15	14,33	95,54

14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Prosentase koperasi aktif	70,5	55,52	78,75
		2. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	2,93	3,37	115,02
15.	Meningkatnya investasi didaerah	1. Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	517,830715	636,142150	122,85
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	1. Prevalensi peserta KB aktif	72,22	72,28	100,08
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	1. Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	72,34	72,24	99,86
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	1. Prosentase BUMDes yang aktif	11,6	11,9	100
		2. Jumlah desa tertinggal	105	0	100
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan	1. Nilai SAKIP	BB	-	
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	1. Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	82,20	96,7
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN	84	82,4	98
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	1. Prosentase jalan dengan kondisi baik	93	86,94	93,48
		2. Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	86	81,29	94,52

		3. Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	90	18,89	0,21
		4. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	20	1,18	5,90
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	76,50	83,82	109,57
		2. Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,11	106,12	120,44
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	1. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4	14	350
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	1. Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	17,49	254
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	1. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,602	14,01	146,84
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	64%	70,65%	110,39
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	1. Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	23%	23,11%	100,5

PENGUKURAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
			Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	100%	100 %	100	100 %	100 %	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan	Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78,25%	73,09%	93,41	79,25%	75,68%	95,49	80,50%	73,24%	90,98

	produktivitas pertanian										
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	137,63	138,24	100,44	139,01	153,40	110,35	140,40	153,60	109,40
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Nilai produksi bahan pangan utama (ton)	819.000	803.382	98,09	822.200	804.426	97,86	824.500	808.539	98,06
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	Nilai produksi perkebunan	238.170	231.967	97,40	239.270	215.640	90,12	239.380	239.629	100,10
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Prosentase peningkatan produksi peternakan • Daging • Telur • Susu	0,68% 0,87% 4%	4,01% 0,67% 2,56%	590,32 77,55 63,96	0,78 % 0,9 % 4 %	4,91% 0,84% 3,61%	629,04 92,90 90,34	0,65 0,95 4	-3,96 -14,79 -0,51	-609,23 -1.556,84 -12,75
		Prosentase peningkatan produksi perikanan									

		• Kolam • Perairan Umum	12,01% 5%	12,07% 5,12%	100,50 102,40	16,05 % 4%	8,13% 3,96%	50,65 99	5,49 5	6,07 4,89	110,56 97,80
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	21,64 %	101,97	371,21	22,18%	51,62%	232,73	22,73	40,40	177,74
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	88%	86,8%	98,6	90%	60,23%	66,92	92	-655	-712
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	4 Desa	4 desa	100	6 Desa	6 desa	100	2	0	0
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	13,11	12,86	98,09	13,21	12,87	97,43	13,43	13,15	97,92

	keluaran pendidikan										
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Angka kematian ibu	61,87	72,6	82,65	58,3	58,29	100	68,71	83,82	83,60
		Angka kematian bayi	7,42	6,8	108,35	7,29	6,5	112	7,5	7,1	100
12.	Meningkatnya sektor industry	Angka pertumbuhan industri	3.400	2884	84,82	3.450	3.343	96,89	3.500	3.349	95,68
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	Jumlah kunjungan wisata	1.959.964	3.252.052	165,92	2.198.352	4.186.008	190.42	975.444	908.907	93,18
		Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	45%	50,20%	111,55	47,50%	51,65%	108,74	15	14,33	95,54
14.	Meningkatnya kualitas	Prosentase koperasi aktif	69,5%	53,4%	76,83	70 %	53,76%	76,80	70,5	55,52	78,75

	kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	2,03	1,94	95,68	2,48	11,27	332,45	2,93	3,37	115,02
15.	Meningkatnya investasi didaerah	Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	Rp. 488.105114	Rp. 586.856516	120,23	Rp. 502,748267	Rp. 2.637,14	524,55	Rp.517,830715	Rp.636,142150	122,85
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Prevalensi peserta KB aktif	71,66	71,98	100,45	71,94	72,7	101,06	72,22	72,28	100,08
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	74,24	73,93	99,58	74,29	74,61	100,43	72,34	72,24	99,96
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat	Prosentase BUMDes yang aktif	6,9% (16 desa)	23,9 % (82 desa)	346,37	9,3 % (32 desa)	19,2 % (66 desa)	206,45	11,6	11,9	100

	perdesaan	Jumlah desa tertinggal	109 Desa	86 Desa	121,10	107 Desa	103 Desa	103,9	105	0	100
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan	Nilai SAKIP	B	B	-	BB	B	-	BB		
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	90	105	85	84	98,82	85	82,20	96,70
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	80	80,07	100%	82	82,3	100%	84	82,4	98
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Prosentase jalan dengan kondisi baik	90,5%	88,14%	97,39	92,50%	88,86%	96,06	93	86,94	93,48
		Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	89,5	83%	97,53	84,50%	81,12%	96	86	81,29	94,52
		Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air	75%	73,61	98,15	85%	83,26%	97,95	90	18,89	0,21

		minum layak									
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	50%	100%	200	30%	100%	333,3	20	1,18	5,90
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	75,5%	74,42%	98,57	76	82,01	107,91	76,50	83,82	109,57
		Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	86,99%	86,77%	99,75	87,46%	99,4	113,65	88,11	106,12	120,44
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	9	9	100	4	14	350	4	14	350
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	3%	3,025%	100	3%	7,62	254	4	17,49	254

26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,002 Ha	10,285 Ha	114,25	9,302 (Ha)	10,285 Ha	110,56	9,602	14,01	146,84
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	60%	67,70%	112	62%	71,61%	115,5	64	70,65	110,39
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	21%	21,65%	103,1	22%	22,45%	102,05	23	23,11	100,5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Akhir Periode RPJMD

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET AKHIR PERIODE RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD (2021)	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	2. Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	82 %	73,24	89,32
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	3. Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	141,80	153,60	108,32
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	4. Nilai produksi bahan pangan utama	826.000 ton	808.539	97,89
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	5. Nilai produksi perkebunan	239.480	239.629	100,06
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan	6. Prosentase peningkatan produksi peternakan			

	perikanan	• Daging • Telur • Susu	0,73 % 0,95 % 4 %	-3,96 -14,79 -0,51	-609,23 -1.556,84 -12,75
		7. Prosentase peningkatan produksi perikanan • Kolam • Perairan Umum	 4,5 4	 6,07 4,89	 134,89 122,5
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	8. Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	23,29 %	40,40	173,47
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	9. Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	95 %	-655	-689
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	10. Jumlah Desa Tangguh Bencana	10 Desa	0	0%
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	11. Angka Harapan Lama Sekolah	13,65 %	13,15	96,34
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi	12. Angka kematian ibu	41,64 %	83,82	201,30
		13. Angka kematian bayi	6,87 %	7,1	103,35

	seluruh masyarakat				
12.	Meningkatnya sektor industry	14. Angka pertumbuhan industri	3.550	3.349	94,34
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	15. Jumlah kunjungan wisata	2.680.440	908.907	33,91
		16. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	52,50	14,33	27,30
14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	17. Prosentase koperasi aktif	71 %	55,52	78,20
		18. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	3,39%	3,37	99,41
15.	Meningkatnya investasi didaerah	19. Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	Rp. 533,365637	636,142150	119,27
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	20. Prevalensi peserta KB aktif	72,50	72,28	99,70
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	21. Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	74,39 %	72,24	97,11
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	22. Prosentase BUMDes yang aktif	13,9%	11,9	85,61
		23. Jumlah desa tertinggal	103	0	100
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaran	24. Nilai SAKIP	A		

	pemerintahan				
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	25. Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	82.02	96,70
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	26. Indeks Profesionalitas ASN	86	82,4	95,81
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	27. Prosentase jalan dengan kondisi baik	89,5 %	86,94	97,13
		28. Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	89,5 %	81,29	90,82
		29. Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	95 %	18,89	19,8
		30. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	0 %	1,18	118
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	31. Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	77	83,82	108,86
		32. Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,50 %	106,12	119,91
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	33. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4	14	350
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	34. Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4 %	17,49	254

26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	35. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,902	14,01	141,48
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	36. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	67 %	70,65	105,45
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	37. Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	24 %	23,11	96,29

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	7.054.419.100	0,580
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	2. Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	21.481.096.000	1,765
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	3. Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	1.083.905.000	0,089
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	4. Nilai produksi bahan pangan utama	8.108.184.100	0,666
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	5. Nilai produksi perkebunan	258.150.000	0,021
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	6. Prosentase peningkatan produksi peternakan	2.994.081.085	0,246

		• Daging • Telur • Susu		
		7. Prosentase peningkatan produksi perikanan • Kolam • Perairan Umum	2.559.386.500	0,210
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	8. Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	6.693.509.750	0,550
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	9. Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	2.043.482.500	0,168
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	10. Jumlah Desa Tangguh Bencana	123.350.000	0,010
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan	11. Angka Harapan Lama Sekolah	190.768.502.951,76	15,679
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi	12. Angka kematian ibu	2.593.093.000	0,213
		13. Angka kematian bayi	2.593.093.000	0,213

	seluruh masyarakat			
12.	Meningkatnya sektor industry	14. Angka pertumbuhan industri	208.850.000	0,017
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	15. Jumlah kunjungan wisata	4.123.025.600	0,339
		16. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	1.280.121.000	0,105
14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	17. Prosentase koperasi aktif	749.129.667	0,062
		18. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	868.380.000	0,071
15.	Meningkatnya investasi didaerah	19. Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	1.478.041.570	0,121
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	20. Prevalensi peserta KB aktif	10.574.220.500	0,869
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	21. Indeks pemberdayaan Gender (IPG)	283.983.500	0,023
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	22. Prosentase BUMDes yang aktif	720.000.000	0,059
		23. Jumlah desa tertinggal	123.700.000	0,010

19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan	24. Nilai SAKIP	9.934.031.500	0,816
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	25. Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84.336.000	0,007
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	26. Indeks Profesionalitas ASN	10.867.028.450	0,893
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	27. Prosentase jalan dengan kondisi baik	120.818.024.773	9,930
		28. Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	4.330.855.000	0,356
		29. Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	3.007.012.240	0,24
		30. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	1.500.000.000	0,123
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	31. Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	62.589.944	0,005
		32. Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	1.114.833.500	0,092

24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	33. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	1.000.000	0,000
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	34. Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4.589.255.000	0,377
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	35. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	8.781.070.000	0,722
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	36. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	758.520.000	0,062
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	37. Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	123.250.000	0,010
JUMLAH			**434.735.511.231**	**35,73**
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG			**782.014.483.204**	**64,27**
TOTAL BELANJA LANGSUNG			**1.216.749.994.434,78**	**100**

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	1. Prosentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	7.054.419.100	5.765.133.379	81,72	18,28
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	2. Prosentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,50%	73,24%	90,98	21.481.096.000	18.637.492.559	86,76	4,22
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	3. Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	140,40	153,60	109,40	1.083.905.000	1.047.498.000	96,64	12,76
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	4. Nilai produksi bahan pangan utama	824.500	808.539	98,06	8.108.184.100	7.245.242.010	89,36	8,7
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	5. Nilai produksi perkebunan	239.380	239.629	100,10	258.150.000	256.862.340	99,50	0,6

6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	6. Prosentase peningkatan produksi peternakan • Daging • Telur • Susu	0,65 0,92 4	-3,96 -14,79 -0,51	-609,23 -1.607,61 -12,75	2.994.081.085	2.944.625.965	98,35	-627,92
		7. Prosentase peningkatan produksi perikanan • Kolam • Perairan Umum	5,49 5	6,07 4,89	110,56 97,80	2.559.386.500	2.303.766.126	90,01	14,17
7.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	8. Prosentase jumlah PMKS yang ditangani	22,73	40,40	177,74	6.693.509.750	6.004.089.017	89,70	88,04
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	9. Prosentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	92	-655	-712	2.043.482.500	1.873.402.978	91,68	-803,68
9.	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	10. Prosentase Desa Tangguh Bencana	2	0	0	132.350.000	0	0	0
10.	Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan	11. Angka Harapan Lama Sekolah	13,43	13,15	97,92	190.768.502.951,76	187.144.142.719,95	98,10	-0,18

	kualitas keluaran pendidikan								
11.	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	12. Angka kematian ibu	68,71	83,82	83,60	2.593.093.000	1.323.109.118	51,02	32,58
		13. Angka kematian bayi	7,5	7,1	94,66	2.593.093.000	1.323.109.118	51,02	48,98
12.	Meningkatnya sektor industry	14. Angka pertumbuhan industri	3.500	3.349	95,68	208.850.000	118.300.912	56,63	39,05
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	15. Jumlah kunjungan wisata	975.444	908.907	93,18	4.123.025.600	2.02.249.253	49,17	44,01
		16. Prosentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	15	14,33	95,54	1.280.121.000	1.056.622.000	82,54	13
14.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	17. Prosentase koperasi aktif	70,5	55,52	78,75	749.129.667	704.694.197	94,07	-15,32
		18. Prosentase pertumbuhan usaha mikro	2,93	3,37	115,02	868.380.000	792.531.487	91,27	23,75
15.	Meningkatnya investasi didaerah	19. Nilai realisasi investasi (milyar rupiah)	Rp.517,830715	Rp.636,142150	122,85	1.478.041.570	1.369.232.230	92,64	30,21

16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	20. Prevalensi peserta KB aktif	72,22	72,28	100,08	10.574.220.500	7.910.015.222	74,80	25,28
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	21. Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	74,34	72,24	97,18	283.983.500	234.945.375	82,73	17,23
18.	Meningkatnya Keberdayaan masyarakat perdesaan	22. Prosentase BUMDes yang aktif	11,6	11,95	103	720.000.000	391.362.800	54,36	45,64
		23. Jumlah desa tertinggal	105	-	>100	123.700.000	92.721.456	74,96	25,04
19.	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan	24. Nilai SAKIP	BB	B	0	9.934.031.500	8.945.826.536	90,05	
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	25. Hasil nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	82,20	96,70	84.366.000	74.453.500	88,25	9,35
21.	Meningkatnya profesionalitas ASN	26. Indeks Profesionalitas ASN	84	82,4	98	10.867.028.450	8.730.039.210	80	20
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	27. Prosentase jalan dengan kondisi baik	93	86,94	93,48	120.818.024.773	112.977.394.455	93,51	-0,3
		28. Prosentase jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	86	81,29	94,52	4.330.855.000	3.284.764.800	75,85	18.67
		29. Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	90	4,64	0,05	3.007.012.240	1.411.853.500	46,95	- 46,74

		30. Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	20	0,54	0,03	1.500.000.000	1.482.158.800	98,81	- 92,91
23.	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	31. Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	76,50	83,82	109,57	62.589.944	62.426.159	99,74	9,83
		32. Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	88,11	106,12	120,44	1.114.833.500	1.112.760.388	99,81	20,63
24.	Meningkatnya sistem informasi pemerintah daerah	33. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah	4	14	350	1.000.000	0	0	350
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	34. Prosentase penurunan beban pencemaran lingkungan	4	17,49	254	4.589.255.000	4.252.762.239	92,67	161,33
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	35. Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	9,602	14,09999	146,844	8.781.070.000	8.083.314.848,64	92,05	54,79
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	36. Prosentase tingkat partisipasi angkatan kerja	64	70,65	110,39	758.520.000	706.432.650	93,13	17,26
28 8.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	37. Prosentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	23	23,11	100,5	123.250.000	123.181.100	99,94	0,56

Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan atas capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Misi 1 : Melaksanakan ajaran agama dan / atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti	100	100 %	100 %	100	100%	100

Sasaran 1 : Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti yang pada tahun 2020 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan kategori sangat berhasil upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut : karena :

1. Terbangunnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan;
2. Terciptanya ketertiban,ketentraman, dan keamanan yang berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik,demokrasi dan HAM.

Misi 2 : Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan

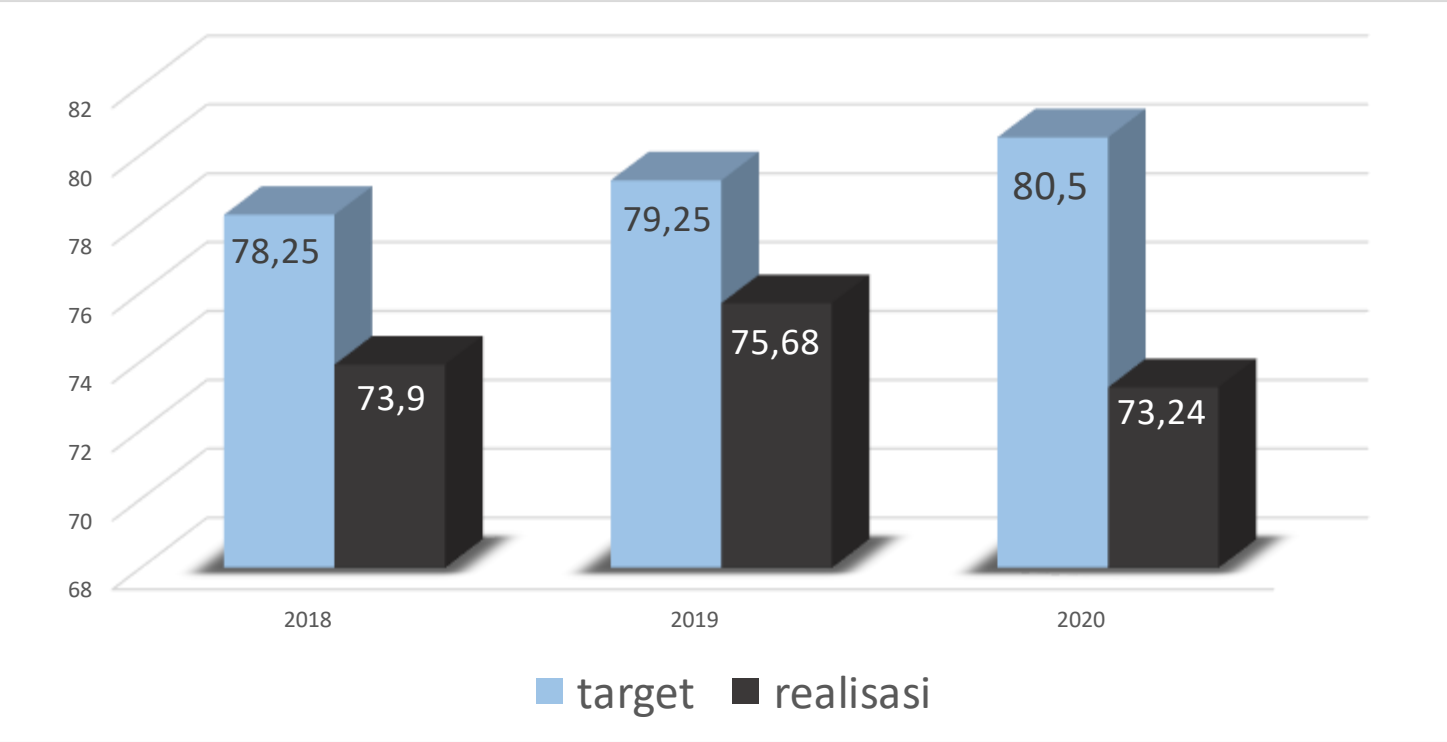
Tujuan : Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
2.	Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian	Persentase panjang saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	87,06	80,50%	73,24%	90,98	82	89,32

Sasaran 2 : Prosentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik. Pada Tahun 2019 ditargetkan 80,50 % dan realisasinya 73,24 % dengan capaian 90,98 %. Capaian tersebut masuk dalam katagori Sangat Berhasil .Hal ini disebabkan :

1. Tercukupinya anggaran Rehabilitasi /Pemeliharaan Infrastruktur Irigasi Tahun Anggaran 2020 sehingga rencana Pelaksanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi terealisasi .

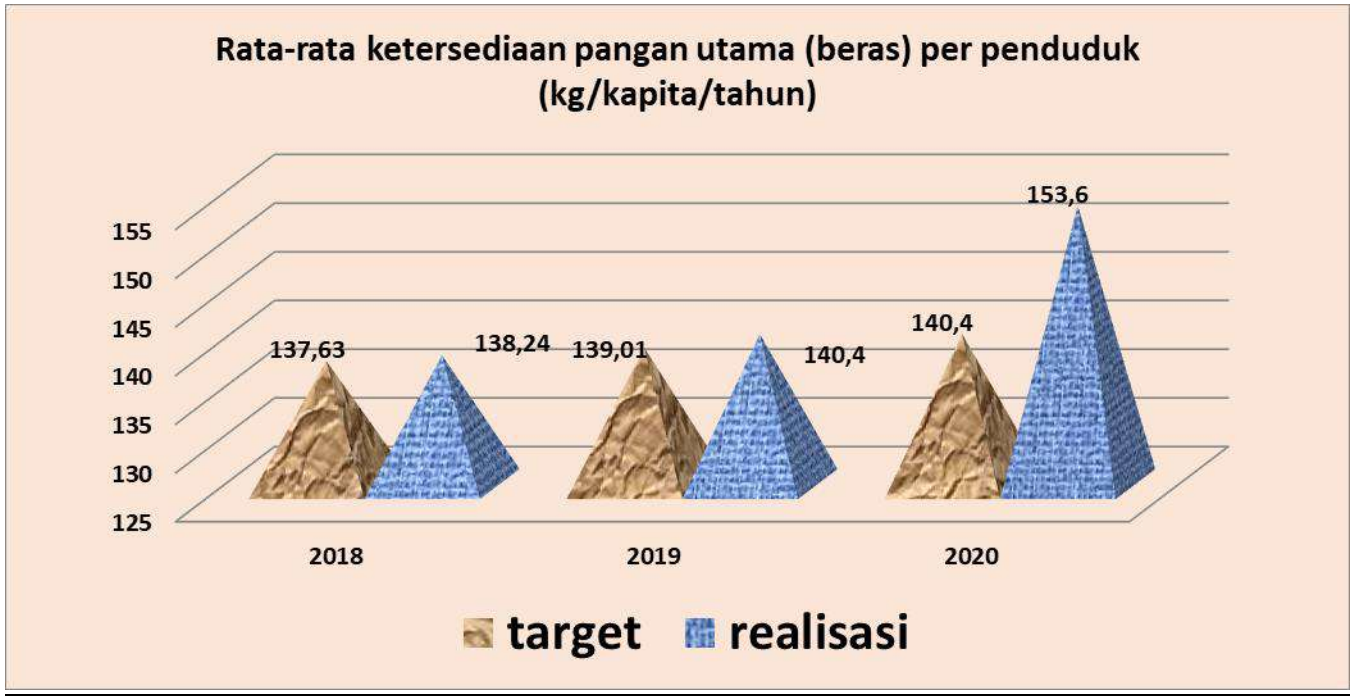
2. Disamping itu cuaca di tahun 2020 sangat mendukung sehingga pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Saluran Sekunder dapat terealisasi semua
3. Juga pada tahun 2020 kesadaran petani terkait proses pelaksanaan Kontruksi sangat besar dimana, mereka dengan penuh kesadaran bersedia melaksanakan gilir (aliran air mati sementara) selama proses pelaksanaan kontruksi .



Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
3.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	134,92	140,40	153,60	109,40	141,80	108,32

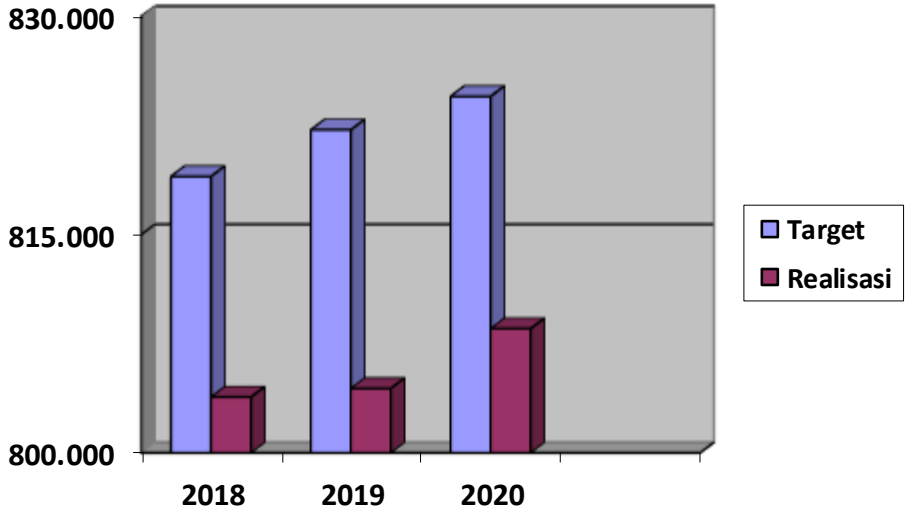
Sasaran 3 : Rata-rata ketersediaan pangan utama per penduduk menggambarkan jumlah beras yang tersedia bagi tiap orang penduduk di Kabupaten Kediri per hari untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Ketersediaan pangan utama dipengaruhi oleh jumlah produksi beras, keluar masuknya beras dari dan ke luar Kabupaten Kediri, stok akhir bulog serta jumlah penduduk Kabupaten Kediri. Target rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk Kabupaten Kediri tahun 2020 adalah sebanyak 140,40 kg/kapita/tahun. Pada akhir tahun 2020 diperoleh jumlah ketersediaan pangan utama sebanyak 153,60 kg/kapita/tahun atau dengan capaian kinerja sebesar 109,40 % (kategori Sangat Memuaskan). Sedangkan jumlah kebutuhan konsumsi beras per penduduk Kabupaten Kediri menurut data Badan Pusat Statistik sebanyak 72,24 kg/kapita/tahun. Ini menunjukkan pada tahun 2020 Kabupaten Kediri surplus ketersediaan pangan utama per penduduk rata-rata sebesar 81,36 kg/kapita/tahun. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja antara lain : 1) stok cadangan pangan pemerintah di Bulog yang mencukupi; 2) produksi gabah Kabupaten Kediri sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri dan sebagian dipasarkan ke luar Kabupaten Kediri; dan 3) alur perdagangan beras di Kabupaten Kediri lancar dan secara umum penggilingan banyak mengambil bahan baku (gabah) dari luar Kabupaten Kediri untuk dijadikan stok/ cadangan pangan masyarakat. Selanjutnya, DKPP Kabupaten Kediri berperan memastikan

ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan.



Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
4.	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Nilai produksi bahan pangan utama (ton)	814.108	824.500	808.539	98,06	826.000	97,38

Sasaran 4 : Capaian nilai produksi bahan pangan utama mencapai 98,06 %, rencana tindak lanjut yaitu dengan peningkatan produktivitas melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP), penggunaan bibit nggul,pemupukan yang berimbang,peningkatan kesuburan tanah,penggunaan teknologi pertanian maupun pola tanam.

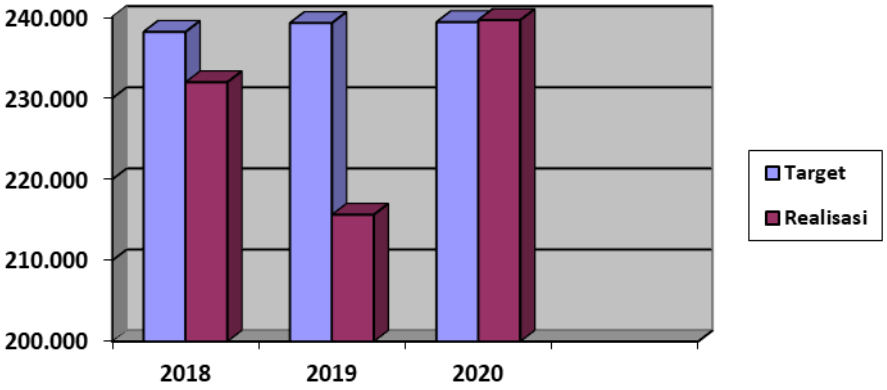


Produksi Bahan Pangan Utama

	2018	2019	2020
Target (Ton)	819,000	822.200	824.500
Realisasi (Ton)	803,832	804.426	808.539

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
5.	Meningkatnya produksi hasil perkebunan	Nilai produksi perkebunan (x 10 ton)	238.158	239.380	239.629	100,10	239.480	90,04

Sasaran 5 : Capaian Nilai Produksi perkebunan mencapai 100,10%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi hasil perkebunan sebesar 11% dari tahun 2019. Rencana Tindak Lanjut, adalah dengan peningkatan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul dan pengendalian hama penyakit secara terpadu.



Produksi Perkebunan Utama

	2018	2019	2020
Target (X 10 Ton)	238,170	239,270	239.380
Realisasi (X 10 Ton)	231,967	215,640	239.629

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2019 Terhadap 2021
				TARGET	Realisasi	Capaian (%)		
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi peternakan						
		- Daging	0,63	0,65	-3,96	-609,23	0,73	
		- Telur	0,55	0,95	-14,79	-1.556,84	0,95	
		- Susu	0,65	4	-o,51	-12,75	4	

. Sasaran 6 : Persentase peningkatan produksi peternakan menggambarkan seberapa besar kenaikan produksi di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Produksi peternakan yang dihitung meliputi produksi daging, telur dan susu. Pada tahun 2020, produksi daging mencapai 19.413,829 ton. Sedangkan produksi di tahun 2019 sebanyak 20.214,658 ton. Ini berarti pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi daging sebanyak 800,829 ton atau sebesar 3,96%. Walaupun terjadi penurunan produksi daging di tahun 2020, namun jumlah produksi daging berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 19.060,150 ton atau tercapai 101,86%. Untuk komoditas telur, pada tahun 2020 produksi mencapai 72.753,199 ton. Sedangkan produksi telur di tahun 2019 sebanyak 85.384,502 ton, sehingga produksi telur di tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 12.631,303 ton atau sebesar 14,79%. Produksi susu pada tahun 2020 sebanyak 20.989,662 ton. Dibandingkan produksi di tahun 2019 yang sebanyak 21.096,617 ton, terjadi penurunan produksi susu sebesar 106,955 ton atau 0,51%. Jumlah produksi susu pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 19.083,993

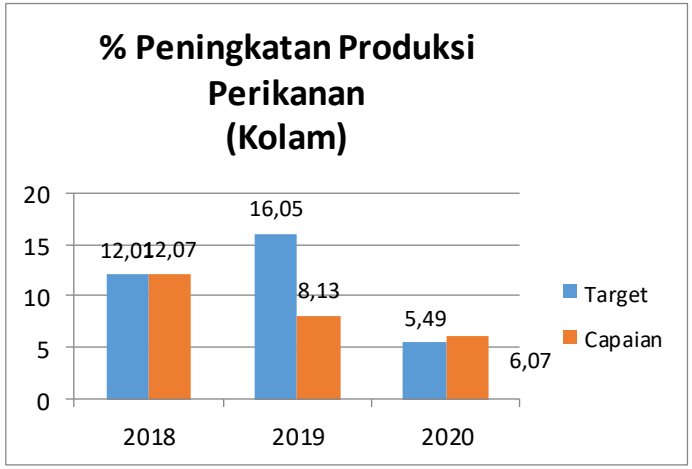
ton sehingga meskipun ada penurunan produksi dibanding tahun 2019 namun masih berhasil mencapai target tahun 2020 sebesar 109,99%. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pandemi Covid-19 berdampak pada banyak sektor riil termasuk sektor usaha peternakan. Lesunya perekonomian pelaku usaha peternakan menyebabkan kurangnya permodalan untuk operasional usaha peternakan serta naiknya biaya operasional membuat banyak peternak yang gulung tikar atau mengurangi populasi. Hal ini tentu berdampak pada jumlah produksi peternakan. Yang paling terlihat penurunan produksinya adalah komoditas telur. Harga Day of Chicken (DoC) ayam petelur yang naik membuat peternak kesulitan untuk melakukan repopulation. Ayam yang sudah berusia tua dan tidak produktif atau lebih dikenal dengan ayam afkir tidak bisa diganti dengan yang lebih muda. Ayam afkir yang dijual tidak sebanding dengan harga DoC yang sudah tinggi sehingga peternak kehabisan modal untuk memperbarui ayam. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target jumlah produksi daging dan susu pada tahun 2020 antara lain terus dilaksanakannya kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing. Kegiatan tersebut masih akan terus dilaksanakan di tahun 2021 untuk menjaga tren positif peningkatan produksi peternakan di masa yang akan datang. Selain itu pada tahun 2021 akan dilakukan stimulus untuk mendorong usaha peternakan bagi kelompok ternak berupa hibah bansos peternakan produktif serta bantuan peralatan pemrosesan pakan ternak. Khusus komoditas telur, jumlah produksi pada tahun 2020 masih termasuk kategori berhasil mencapai target yaitu sebesar 90,06% di tengah-tengah kondisi cuaca, pandemi, harga pakan dan DoC yang meningkat

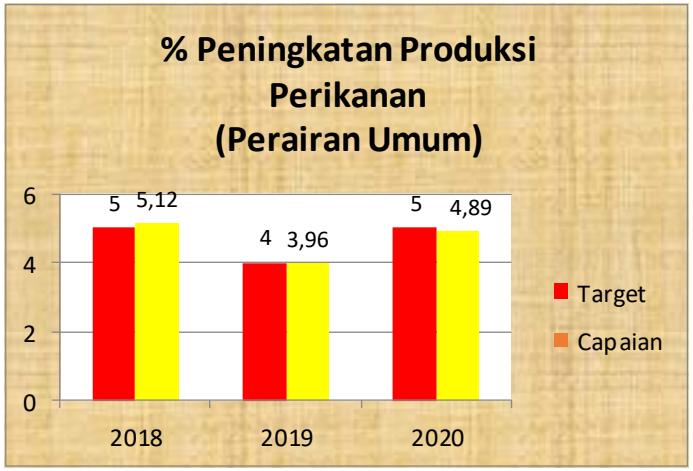
Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
6.	Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan						
		- Kolam	6,86%	5,59	6,07%	110,56	4,5%	134,89
		- Perairan umum	1,43%	5	4,89%	97,80	4	122,5

Sasaran 6 : meningkatnya produksi perikanan dengan indikator sasaran persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2020 ditargetkan untuk perikanan di kolam sebesar 5,49 % dan perikanan di perairan umum sebesar 5 % dimana terealisasi untuk kolam sebesar 6,07 % serta perairan umum sebesar 4,89 % dengan capaian kinerja sebesar 110,56 % untuk kolam dan sebesar 97,80 % untuk perairan umum, dengan demikian kategori capaian kinerja Dinas Perikanan untuk kolam dan perairan umum adalah baik.. Penyebab keberhasilan tersebut adalah :

1. Adanya kegiatan pendampingan untuk kelompok pembudidaya ikan dengan mengadakan sosialisasi CPIB (cara pembenihan ikan dengan baik), dan sosiaisasi CBIB (cara budidaya ikan dengan baik) dan pemberian sertifikat CPIB dan CBIB
2. Adanya kegiatan pemberian bantuan/hibah kepada masyarakat (kelompok pembudidaya ikan/Pokdakan) berupa benih, induk, pakan dan saprodi (peralatan budidaya ikan)

3. Kegiatan promosi dalam rangka penumbuhan pembudidaya ikan baru
4. Adanya pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan melalui pemantauan kualitas air, pemantauan obat-obatan dan pemantauan kualitas pakan
5. Sertifikasi tanah dalam rangka memfasilitasi akses permodalan pembudidaya ikan
6. Adanya Penguatan kelembagaan melalui kegiatan pembinaan teknis perikanan dengan cara penilaian kelas kelompok budidaya ikan dari pemula menjadi madya
7. Adanya penebaran ikan di perairan umum (ikan tawes dan tombro) dan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan di Perairan umum
8. Adanya kegiatan pelatihan tentang teknologi budidaya dan pembernihan ikan





Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
7.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase jumlah PMKS yang ditangani	20,61	22,73	40,40	177,74	23,29	73,47

Sasaran 7 : Keberhasilan capaian kinerja 177,74% disebabkan penambahan objek sasaran kegaiatan sejalan dengan penanganan Covid-19 pada PMKS terdampak, selain itu juga adanya kerjasama dan dukunga yang baik antara pemerintah dengan potensi dan sumber kesejahteraan social erta pihak – pihak terkait.

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2019 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
8.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku	Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup	84	92	-655	-712	95	-803,68

Sasaran 8 : tidak tercapainya indikator sasaran % penurunan pelanggaran perda/perbup disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya perubahan formula dalam menentukan indikatornya
2. Adanya pelaksanaan pilkada yang tidak direncanakan dalam menentukan target
3. Terbitnya Peraturan Bupati Kediri yang baru untuk penanganan pandemic Covid – 19, sehingga menyebabkan naiknya pelanggaran perda secara drastis

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
9	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	2	0	0	10	0

Sasaran 9 : Tidak tercapai dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan bencana non alam (Covid-19)

Misi 4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan

Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyrakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal

Sasaran 10 :

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

NO	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Sekolah gratis	Sekolah bebas pungutan,dan beasiswa bagi keluarga tidak mampu sampai jenjang perguruan tinggi
2.	Angka putus sekolah	Diarahkan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan (Kejar Paket A,B, dan C)
3.	Warga Kab. Kediri bersekolah di luar kota	Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah berbasis IT dan workshop kompetensi guru

Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan

Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
11.	Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Angka Kematian Ibu	68,71	68,71	83,82	83,60	41,64	201,30
		Angka Kematian Bayi	7,5	7,5	7,1	100	6,87	103,35

Sasaran 10 :

1. Angka Kematian Ibu : Tahun 2020 Angka Kematian Ibu masih di angka 83,82/100.000 KH . Jumlah kematian ibu sebesar 19 orang, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 58,3 /100.000 KH yang berarti ada sebanyak 14 ibu yang meninggal pada masa kehamilan, persalinan, maupun nifas.Kenaikan AKI di tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 dimana tenaga kesehatan kurang siap dan minimnya APD yang dimiliki nakes. Ditindak lanjuti dengan pemantauan dan pelayanan yang berkualitas dengan dokter penanggungjawab KIA dan bidan memantau ibu hamil risiko tinggi dengan ketat dan melakukan rujukan dini terencana.

2. Angka Kematian Bayi : Tahun 2020 tercatat 7,1/1000 KH atau sebanyak 162 bayi yang meninggal . Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah kematian sebesar 157 bayi atau 6.5/1000KH. Ditindak lanjuti dengan peningkatan pemantauan dan peningkatan kualitas pelayanan Countinoum of Care. Pada program 1000 HPK atau 1000 Hari Pertama Kehidupan , dimana pada masa ini selalu dipantau pertumbuhan dan perkembangan bayi sehingga mengurangi resiko kematian.Selain itu pencegahan juga dilakukan pada saat bayi berada dalam kandungan, dengan selalu memantau kondisi kesehatan ibu hamil.

Misi 6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro

Tujuan : Mengembangkan Kreativitas, Produktivitas dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
12.	Meningkatnya sektor industri	Angka pertumbuhan industri (unit)	2.129	3.500	3.349	95,68	3.550	94,346

.Sasaran 12 : Kurang memenuhi target dikarenakan dari evaluasi di lapangan rata-rata perusahaan mengalami penurunan omzet sebesar 40-50% bahkan ada yang berhenti sementara untuk industry kecil. Industri menengah dan Besar menurun sekitar 30% dikarenakan pandemic Covid-19

Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah

Tujuan : Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020				Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target 2020 awal	*Target 2020 perubahan	Realisasi	Capaian (%)		
13.	Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah	Jumlah kunjungan wisata	2.438.611	2.438.611	**975.444**	908.907	93,18	2.680.440	33,91
		Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan	50,00	50,00	**15,00**	14,33	95,54	52,50	27,30

Sasaran 13 :

- Jumlah kunjungan wisata: obyek-obyek wisata ditutup bulan maret, dan diprediksi buka lagi akhir tahun 2020. Target awal dibagi perkuartal (3) dan ditambah 20% karena asumsi buka lagi di dua bulan terakhir tahun 2020
- Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan: kegiatan pagelaran di dalam dan luar daerah tidak diizinkan sejak bulan Maret, dan diprediksi akan diizinkan lagi pada triwulan 4 tahun 2020. Target awal dibagi triwulanan (4) dan ditambah 2,5% karena asumsi diizinkan lagi pada 3 bulan terakhir tahun 2020

Misi 8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan

Tujuan : Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				TARGET	Realisasi	Capaian (%)		
14.	Meningkatnya Kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatnya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase koperasi aktif	68,07 %	70,5 %	55,52%	78,75	71	78,20
		Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,68 %	2,93	3,37	115,02	3,39	99,41

Sasaran 14 : Keberhasil dalam mencapai indicator sasaran persentase koperasi aktif didukung dengan Pemberian pembinaan secara khusus terhadap koperasi yang aktivitasnya cenderung menurun.

Sedangkan untuk indicator sasaran Persentase pertumbuhan usaha mikro didukung dengan Meningkatnya Fasilitasi bagi UMKM berupa Pelatihan dan Promosi,sedang untuk hambatannya adalah belum secara maksimal UMKM mengakses fasilitas pelatihan dan promosi, guna meminimalisir hambatan tersebut kami lebih fokus untuk memaksimalkan fasilitasi pelatihan dan promosi.

Misi 9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha

Tujuan : Meningkatnya iklim investasi

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
15.	Meningkatnya investasi di daerah	Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah)	Rp. 418,259894	Rp. 517,830715	Rp. 636,142150	122,85	533,365637	494,43

Sasaran 15 : Dari data yang ada menunjukan Kontribusi PMDN mencapai 98,28% dari total investasi sedangkan dari PMA sebesar 1,72%. DPMPTSP mencatat 4 peringkat tertinggi sektor yang diminati investor , yakni Jasa Lainnya (Rp. 148,76 M); Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry (Rp. 142,72 M); Industri Makanan/Food Industry (Rp. 132,62 M); Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair (Rp. 120,33 M). Hal ini dikarenakan :

1. Adanya perubahan pola konsumsi masyarakat.
2. Merupakan daerah penghasil bahan baku yang besar sehingga mendukung industri makanan maupun perdagangan
3. Iklim investasi yang kondusif sehingga mendukung pengembangan usaha industri yang sudah ada

Misi 10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan

Tujuan : Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan.

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
16.	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	Prevalensi peserta KB Aktif	70,81	72,22	72,28	100,08	72,50	99,70

Sasaran 16: Meningkatnya pelayanan keluarga berencana dengan indikator sasaran prevalensi peserta KB aktif hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan kerjamasa antara instansi pemerintah dan swasta
2. Pelayanan pendekatan kepada masyarakat melalui mobil unit pelayanan
3. Pemanfaatan kegiatan momentum dengan mengadakan safari KB
4. Penyebarluasan informasi melalui mobil unit penerangan dan media elektronik

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
17.	Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,09	74,34	72,24	97,18	74,39	97,11

Sasaran 17 : Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan dengan kategori indeks pemberdayaan gender yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 74,34 dan terealisasi sebesar 72,24 dengan capaian 97,18 yang termasuk dalam kategori sangat berhasil, dan menyumbang sebanyak 97,11% dari target akhir RPJMD ,hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan, pelatihan perempuan
2. Adanya evaluasi pengarustamaan gender
3. Mengadakan pameran kelompok usaha perempuan
4. Pembinaan P2WKSS (peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera)
5. Pelatihan pendampingan korban KDRT

	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
18.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase BUMDes yang aktif	–	11,6 % (40 desa)	11,9%	100	13,9	85,99
		Jumlah desa tertinggal	113	105 Desa	0	100	103	100

Sasaran 18 : Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Rencana Tindak Lanjut

Dari uraian data tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis capain kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Persentase BUMDes yang aktif dari target 11,6% dapat terealisasi 11,9% maka capaian kinerjanya lebih dari 100 % . Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan kegiatannya Penunjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Di Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 sudah tidak ada desa dengan status desa tertinggal. Untuk mendukung tercapainya sasaran untuk mengurangi Desa Tertinggal. DPMPD Kabupaten Kediri hanya memfasilitasi kegiatan tersebut sedangkan status dari desa merupakan keputusan terakhir ada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Misi 11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi

Tujuan : Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang profesional

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2019 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
19.	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	CC	BB	B	-	A	--

Sasaran 19 : Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikator nilai SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2020 yaitu BB dan realisasinya B yang termasuk dalam kategori baik,hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Memperkuat komitmen bersama
2. Peningkatan koordinasiTim, Fasilitasi SAKIP dan Pendampingan dari Menpan RB dan Biro Organisasi
3. Penguatan kapasitas dan komitmen Kepala OPD
4. Penyelarasan Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan
5. Membangun sistem dan peraturan (Persiapan E-SAKIP)

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
20.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Hasil nilai IKM (Indeks kepuasan masyarakat)	80	85%	84%	98,82	85	98,82

Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dengan indikator hasil nilai IKM yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 85 dan terealisasi 84 dengan capaian 98,82% yang termasuk dalam kategori baik, dan menyumbang sebanyak 98,82% dari target akhir RPJMD, hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Memfasilitasi pembinaan pelayanan publik diseluruh perangkat daerah pelayanan
2. Mengadakan monitoring pada perangkat daerah pelayanan
3. Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
21	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	-	84	82,4	98	86	95,81

Sasaran 21 : Meningkatnya profesiaonalitas ASN dengan indikator Indek profesioanlitas ASN dengan target 84 pada tahun 2020 dan terealisasi 82,4 dengan capaian 98% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil dan menyumbang 95,81 % dari target pada akhir RPJMD (2021) tidak mencapai target dikarenakan

1. Masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat sesuai dengan jenjangnya
2. Masih banyaknya pejabat struktural terutama di kecamatan yang kualifikasi pendidikannya belum sesuai dengan syarat jabatan

Sementara tindaklanjut dalam peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Mendorong pejabat struktural untuk menempuh pendidikan / izin belajar dalam rangka menyesuaikan kualifikasi pendidikannya dengan syarat jabatan
2. Meningkatkan kompetensi pejabat struktural melalui pendidikan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya

Misi 12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase jalan dengan kondisi baik	86	93	86,94	93,48	95	97,13
		Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik	77,85	86	81,29	94,52	89,5	90,82

Sasaran 22 :

INDIKATOR SASARAN : Prosentase Jalan dalam Kondisi baik. Pada Tahun 2020 ditargetkan 93 % dan terealisasi 86,94 % dengan capaian 93,48 %. Dilihat dari realisasi Indikator Kinerja, hal tersebut tidak memenuhi target 93% , Hal ini akibat adanya refocusing anggaran untuk Covid 19

INDIKATOR SASARAN : Prosentase Kabupaten dalam Kondisi baik. Pada Tahun 2020 ditargetkan 86 % dan terealisasi 81,29 % dengan capaian 94,52 %. Dilihat dari realisasi Indikator Kinerja, hal tersebut tidak memenuhi target 86% , Hal ini akibat adanya refocusing anggaran untuk Covid 19.

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 Terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
22.	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	50%	90%	18,89%	0,21	95	87,64
		Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	100%	20%	1,18%	5,90	0	100

Sasaran 22 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan Persentase penurunan luasan kawasan kumuh dengan target tahun 2020

Untuk pencapaian tersebut diatas, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari realisasi Indikator Kinerja, hal tersebut tidak memenuhi target , Hal ini akibat adanya refocusing anggaran untuk Covid 19
b. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 20% dan teralisasi sebesar 1,18% dengan capaian 100% dengan kategori sangat berhasil. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Kediri berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/511/418.32/2014 yaitu 25,98 Ha di Kecamatan Pare (Kelurahan Pare, Desa Tulungrejo dan Desa Gedangsewu). Berdasarkan hasil intervensi program KOTAKU tahun 2017 dan 2018, dana desa dan program kegiatan sumber dana APBD, hasil perhitungan akhir atau perhitungan outcome peningkatan pada tahun 2019, ketiga desa tersebut dinyatakan Tidak Kumuh.

Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Hasil intervensi program KOTAKU dan Dana Desa.
2. Pembangunan drainase lingkungan di kawasan kumuh.
3. Pembangunan jalan lingkungan di kawasan kumuh.

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
23.	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	--	76,50	83,82	109,57	77	108,86
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan	--	88,5	106,12	120,44	88,50	119,91

Sasaran 23 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan dengan target tahun 2020 sebesar 76,5 dan terealisasi sebsesar 83,82 dengan capaian 109,57 yang termasuk dalam kategori sangat berhasil dan menyumbang sebanyak 108,86% dari target akhir RPJMD
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan dengan target tahun 2020 sebesar 88,5% dan terealisasi sebesar 106,12% dengan capaian 120,44% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil dan menyumbang sebanyak 119,91 % dari target akhir RPJMD Hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :
    1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di bidang perhubungan
    2. Pengadaan sistem informasi manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis IT
    3. Peningkatan kuantitas pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan, antara lain ;

a. Rambu dan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan)
b. APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalulintas) dalam bentuk trafight light dan Flashing Amber (FA)
c. Pengecatan Marka Jalan

Misi 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi

Tujuan : Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
24.	Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah	--	4	14	350	4	350

Sasaran 24 : Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan target ditahun 2020 sebesar 4 dan terealisasi 14 dengan capaian 350%,termasuk kategori sangat berhasil dan menyumbang sebanyak 350 % dari target akhir RPJMD hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya tim teknis yang khusus untuk menangani IT sebanyak (5 orang)
2. Dukungan infrastruktur yang sudah memadai
3. Tersedianya bandwith / koneksi internet, domain, hosting
4. Dukungan dan kebijakan pimpinan

Dari faktor- faktor diatas maka dapat terbangun 12 sistem informasi pemerintah daerah, yaitu :

1. C-panel atau local hosting diperuntukkan website
2. Pengembangan SMS center untuk sarana pengaduan masyarakat dan informasi harga – harga bahan pokok
3. Pembangunan aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) online
4. Dashboard Integrasi CCTV,
5. SINAU (Sistem Informasi Manajemen Penugasan),
6. SILAT (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan),
7. Website SKPD Aplikasi TI,
8. Portal website PPID (Sistem Informasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi),
9. SIMOTI (Sistem Informasi Manajemen Operasional TI),
10. SIPID (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah),
11. SILAB (Sistem Informasi Pelaporan Bandwidth),
12. SINCAN Sistem Informasi Kecamatan

Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang

Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
25.	Menurunnya beban pencemaran lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	-	4%	17,49	254	4%	254%

Sasaran 25 : Menurunnya beban pencemaran lingkungan dengan indikator sasaran Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 4% dan terealisasi 17,49 % dengan capaian 254% dengan kategori sangat berhasil dan menyumbang sebanyak 254% dari target akhir RPJMD hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penurunan beban pencemaran air
   - Sertifikasi industri / uji air limbah pada perusahaan-perusahaan di Kab. Kediri
   - Monitoring terhadap penaatan peraturan Lingkungan Hidup
   - Pengadaan sarana uji kualitas air beserta perlengkapannya
   - Penyusunan laporan daya dukung dan saya tampung sungai
   - Penyusunan inventarisasi data sungai
   - Pengambilan sampel air (uji kualitas air) pada titik-titik badan air di Kab. Kediri
   - Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik dan pengadaan peralatan pengolah sampah domestik
2. Penururan beban pencemaran udara
   - Pengambilan sample udara ámbient dengan metode active sampling
   - Pengambilan sample udara ambient dengan metode passive sampling
   - Penyusunan profil Perubahan Iklim Dampak Gas Rumah Kaca di Kab. Kediri
   - Pengadaan sarana uji kualitas udara beserta perlengkapannya
   - Penanaman bibit tanaman peneduh di kanan kiri jalan

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
26.	Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang	Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan	8,325 Ha	9,602 (Ha)	14,099 Ha	146,84	9,902	141,48

Sasaran 26 : Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang dengan indikator sasaran Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 9,602 dan terealisasi 14,099 dengan capaian 146,84 termasuk dalam kategori sangat berhasil, dan menyumbang sebanyak 141,48% dari target akhir RPJMD hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pengawasan terhadap industri/usaha yang berpotensi menghasilkan pencemar, melaksanakan konservasi sumber daya alam, pengoptimalkan pengelolaan sampah dan pembinaan/sosialisasi pengelolaan limbah dan sampah kepada masyratakat.Pembangunan dan renovasi taman plinth di jalan kawasan SLG dan Pare .

Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang

Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 Terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
27.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja	-	64%	70,65	110,39	67	105,45

Sasaran 27 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan indikator sasaran Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerjayang ditargetkan tahun 2020 sebesar 64% terealisasi 70,65 % dengan capaian 110,39% dengan kategori sangat berhasil dan sudah melampaui dari target akhir RPJMD, hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Program-program Pelatihan kepada Pencari Kerja
2. Adanya Program-program Kewirausahaan
3. Adanya Program Sosialisasi kepada Masyarakat khususnya bagi Masyarakat Pencari Kerja

Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d. 2020 Terhadap 2021
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
28.	Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase Peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	-	23%	23,11	100,5	24	96,29

Sasaran 28 : Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek yang ditargetkan tahun 2020 sebesar 23% terealisasi 23,11% dengan capaian 100,5% dengan kategori sangat berhasil dan menyumbang sebanyak 96,29 % dari target akhir RPJMD hal ini upaya - upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan Sosialisasi kepada Perusahaan secara kontinyu dan berkesinambungan untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja di Perusahaan dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan Pemahaman bagi Pekerja tentang Perlindungan Tenaga Kerja agar Kinerjanya dapat meningkat.

REALISASI ANGGARAN

Pemerintah kabupaten Kediri dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kediri tahun 2019 sebgaimana table berikut :

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	**Belanja**	3.303.033.640.237,12	3.303.033.640.237,12	86,03
2	**Belanja Tidak langsung**	2.086.283.645.802,34	2.086.283.645.802,34	85,84
	Belanja Pegawai	1.109.269.810.108,00	969.651.748.759,00	87,41
	Belanja Hibah	150.357.898.590,00	141.857.904.190,00	94,35
	Belanja Bantuan Sosial	95.700.435.247,00	68.308.471.426,32	71,38
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	22.470.000.000,00	22.241.423.000,00	98,98
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	501.401.286.700,00	500.451.617.500,00	99,81
	Belanja Tidak Terduga	207.084.215.157,34	88.432.937.186,35	42,70
3	**Belanja Langsung**	1.216.749.994.434,78	1.050.586.716.875,25	86,34
	Belanja Pegawai	121.222.741.907,67	106.532.618.211,86	87,88
	Belanja Barang dan Jasa	637.279.446.560,31	533.951.634.525,64	83,79
	Belanja Modal	458.247.805.966,80	410.102.464.137,75	89,49
	Surplus/(Defisit)	(564.704.345.151,62)	43.249.941.536,60	(7,66)



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi :

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan :

   Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

   Pendanaan tugas pembantuan menjadi beban anggaran instansi pemberi tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

   1. Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat yang alokasinya berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga pusat.
   2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan Kepada Daerah dan/atau desa.
   3. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.
   4. Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
   5. SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/lembaga yang menugaskan.
   6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah.

7. Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik.
8. Tidak memerlukan dana pendamping.
9. Penerimaan dan saldo kas disetorkan ke kas umum negara.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Program dan kegiatan yang sumber pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur, atau biasa diistilahkan dengan *"Penyelenggaraan Tugas Pembantuan"* yang harus diselesaikan/dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2020 ini sebanyak 1 (satu) program dengan kegiatan sebanyak 9 (sembilan), dengan total anggaran penyelenggaraan tugas pembantuan sebesar **Rp.54.858.305.000,00** (Lima puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Adapun tingkat serapan anggaran dana Tugas Pembantuan mencapai sebesar **Rp.54.637.002.954,91** (Lima puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus lima puluh empat 91/100 rupiah) yaitu sebesar **99,60%** dari dana yang dialokasikan, artinya bahwa ada sebesar Rp.221.302.045,09 (Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua ribu empat puluh lima 9/100 rupiah) atau sebesar **0,40%** yang tidak mampu diserap dari anggaran kegiatan Tugas Pembantuan.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Target Kinerja

Dari semua program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri oleh instansi pemberi tugas yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan peruntukan dari kedua jenis sumber tersebut. Dasar hukum, institusi pemberi Tugas

Pembantuan, program dan kegiatan yang dipercayakan dan pelaksanaannya, serta sumber dan jumlah anggaran, secara rinci disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana berikut.

TABEL 3.1 PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
SUMBER DANA APBN DAN APBD PROVINSI (TUGAS PEMBANTUAN)
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PENDIDIKAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	DANA			SUMBER DANA	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun					
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SD	12.012.480.000,00	11.962.168.990,46	99,58%	DAK Non Fisik	683 lembaga
2	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler SMP	5.895.780.000,00	5.784.788.964,45	98,12%	DAK Non Fisik	100 lembaga
3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SD	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%	DAK Non Fisik	1 lembaga
4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMP	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%	DAK Non Fisik	1 lembaga
5	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMP	240.000.000,00	180.000.000,00	75,00%	DAK Non Fisik	3 lembaga
6	Program Indonesia Pintar (PIP) SD/LB	19.066.950.000,00	19.066.950.000,00	100,00%	APBN	47.172 siswa
7	Program Indonesia Pintar (PIP) SMP/LB	14.088.750.000,00	14.088.750.000,00	100,00%	APBN	22.402 siswa

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	DANA			SUMBER DANA	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		
8	Bantuan Pemerintah Peralatan TIK SD	2.529.495.000,00	2.529.495.000,00	100,00%	APBN	27 lembaga
9	Bantuan Pemerintah Peralatan TIK SMP	904.850.000,00	904.850.000,00	100%	APBN	10 lembaga
J U M L A H		54.858.305.000,00	54.637.002.954,91	99,60%		

NO	SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	APBN	54.858.305.000,00	54.637.002.954,91	99,60%
T O T A L		54.858.305.000,00	54.637.002.954,91	99,60%

3.2 Permasalahan dan kendala

Permasalahan dan kendala yang sering dihadapi dan ditemui dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan program/kegiatan lain pada umumnya antara lain :

1. Realisasi anggaran secara riil yang seringkali mendekati akhir tahun anggaran;
2. Mendadaknya jadwal kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi; dan
3. Koordinasi internal dan antar instansi yang kurang kuat.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Menyadari adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri akan melakukan berbagai langkah/upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk lebih mengorientasikan diri pada pelaksanaan tugas pembantuan yang telah dipercayakan oleh instansi pemberi tugas pembantuan, meliputi:

1. Efisiensi anggaran dengan mengorientasikan pada skala prioritas kegiatan berdasar waktu pelaksanaan;
2. Optimalisasi personalia dan sarana prasarana guna menyiasati/menjawab keterbatasan waktu sebagai akibat jadwal yang mendadak dan sempit; dan
3. Mengintensifkan dan mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi hingga terwujud efektifitas pelaksanaan tugas.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan yang merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten atau kota terdiri atas:

a. pendidikan dasar;

b. pendidikan kesetaraan; dan

c. pendidikan anak usia dini.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator SPM	Target (%)	
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam penerpan pendidikan dasar (SD/Mi, SMP, MTs)	100	2020
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2020
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Paud	100	2020

4.1.3 Realisasi

Realisasi SPM bidang Pendidikan Kabupaten Kediri sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tingkat Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1.	**Pendidikan Dasar**	**Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)**			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**87.37%**
		221.143	**212.522**	**8.621**	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Buku Teks Pelajaran	212.522	212.522	0	100%
	b. Perlengkapan Belajar	212.522	212.522	0	100%
	c. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.098	1.009	89	91,89%
	d. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	2.107	983	1124	46,65%
	e. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	9.316	9.316	0	100%
	f. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	1.098	1.056	42	96,17%
	g. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	212.522	212.522	0	100%
	h. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	20.232	13.004	7.228	64,27%
2.	**Pendidikan Kesetaraan**	**Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**91,67%**
		4.328	**1.888**	**2.440**	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Modul Belajar	1.888	1.888	0	100%
	b. Perlengkapan Belajar	1.888	1.888	0	100%

	c. Jumlah rombongan belajar di PKBM	85	85	0	100%
	d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1.888	1.888	0	100%
	e. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	550	550	0	100%
	f. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	33	33	0	100%
	g. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	33	33	0	100%
	h. PKBM Terakreditasi minimal C	33	11	22	33,33%
3.	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**91,19%**
		64.814	**64.054**	**760**	
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Buku Gambar	64.054	64.054	0	100%
	b. Alat Mewarnai	64.054	64.054	0	100%
	c. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	987	706	281	71,53
	d. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	64.054	64.054	0	100%
	e. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	987	902	85	91,39%
	f. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.723	2.054	669	75,43%
	g. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3.447	3.447	0	100%
Total Capaian Bidang Pendidikan Kab. Kediri				**90,08 %**	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	**Pendidikan Dasar**			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**132.126.052.563**	**129.543.031.074**	**98,05%**
	a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.220.230.200	7.662.614.570	83,11%
	b. Penyediaan Biaya Personil	85.767.139.363	85.275.183.717,48	99,43%

	Peserta Didik Sekolah Dasar			
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	625.809.000	625.659.000	99,98%
	d. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan dasar	1.827.989.500	1.755.774.787	96,05%
	e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	848.369.000	693.909.000	81,79%
	f. Penambahan Ruang Kelas Baru	8.576.543.000	8.311.615.000	96,91%
	g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	25.067.152.500	25.025.955.000	99,84%
	h. Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan	192.820.000	192.320.000	99,74 %
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**57,718,061,888**	**57,716,603,052**	**100%**
	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	49.718.061.888,76	49716603052,47	100%
	b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.000.000.000	8.000.000.000	100%
	Kegiatan lain	**660.671.000**	**599.643.000**	**90.76%**
	Penyelenggaraan Proses Belajar SD dan SMP	660.671.000	599.643.000	90.76%
2.	**Pendidikan Kesetaraan**			
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**25.738.029.000**	**25.595.699.000**	**99,45%**
	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	4.902.400.000	4.902.200.000	100%
	b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	105.000.000	0	0 %
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98.979.000	98.979.000	100%
	d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	631.650.000	594.520.000	94,12%
	e. Penyediaan Beasiswa Untuk Anak Miskin	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
3.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**37.007.566.000**	**34.817.245.800**	**94.08%**
	a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	199.880.000	99,94%
	b. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100.000.000	94.032.000	94,03%
	c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1711440000	1696307800	99,12%

	d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	453.000.000	451.975.000	99,77%
	e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang guru PAUD	296.326.000	71.351.000	24,08%
	f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	34.246.800.000	32.303.700.000	94,33%
Total		**253.250.380.451**	**248.272.221.926**	**98.03%**

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan, termasuk dalam rangka penerapan pelayanan SPM, Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh :

a. 1 (satu) orang Sekretaris Dinas;
b. 4 (empat) orang Kepala Bidang, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Ketenagaan, dan Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan;
c. 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
d. 12 (dua belas) orang Kepala Seksi, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga, ketiganya di bawah kendali dan koordinasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga. Sedang Kepala Bidang Pendidikan Dasar mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Sekolah Dasar, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar. Kepala Bidang Ketenagaan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Guru, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan, dan Kepala Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Karir. Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dan Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan;

e. 4 (empat) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan TK Pembina Negeri;
f. 611 (enam ratus sebelas) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SD Negeri yang berada pada 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Kediri;
g. 52 (lima puluh dua) orang Kepala UPTD SMP Negeri; dan
h. 1 (satu) orang Kepala UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan dibantu pula oleh kelompok jabatan fungsional, yang terdiri atas pengawas sekolah, dan penilik pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dari 3 indikator yang ada, akan disajikan satu per satu permasalahan dan solusi penerapan pelayanan dasar Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

Permasalahan Penerapan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pendidikan Dasar	Masih adanya anak putus sekolah Belum ada anggaran jasa kerja tim pendataan sekolah Banyak gedung bangunan sekolah yang rusak	Optimalisasi beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu Penganggaran dalam APBD Penganggaran dalam APBD

2.	Pendidikan Kesetaraan	Kurikulum sekolah yang masih mengandalkan kemampuan akademis Beberapa program/kegiatan terbentur protokol kesehatan covid-19	Pembinaan warga belajar sesuai minat, bakat dan kreatifitas berbasis ekonomi kreatif Beberapa kegiatan dapat terlaksana melalui daring
3.	Pendidikan anak usia dini	Kurangnya guru PAUD yang berkualifikasi S-1/ D-IV	Pelatihan guru PAUD tingkat dasar, lanjut dan mahir

4.2 Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan meliputi :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Capaian SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator SPM	Target (%)	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2020
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2020

4.2.3 Realisasi

Penerapan SPM bidang kesehatan diperuntukkan dalam pemberian layanan kesehatan dasar pada penerima sasaran yang berhak mendapatkan layanan SPM. Pemenuhan mutu layanan dasar dicapai melalui pemenuhan jumlah standar barang/jasa layanan kesehatan yang diberikan. Berikut ini adalah realisasi capaian SPM bidang kesehatan tahun 2020 :

Tingkat Capaian SPM Bidang Kesehatan

No	Indikator/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan			**83,74%**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		26. 173	**23.033**	**3.140**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	*Jumlah total yang terlayani*	*Yang belum terlayanai*	*Persentase capaian 100%*
	a. Vaksin Tetasus Difetri (Td)	26.173	23.033	3.140	88.00%
	b. Tablet Tambah Darah	26.173	23.033	3.140	88,00%
	c. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	26.173	17.456	8.717	66,69%
	d. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	26.173	23.033	3.140	88.00 %
	e. Buku KIA	26.173	23.033	3.140	88.00 %
2.	**Pelayanan kesehatan ibu bersalin**	**Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehata**			**90.45%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	*yang belum Terlayani*	
		24.984	**22.598**	**2.386**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Formulir Photograf	24.984	22.598	2.386	90.45 %
	b. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	24.984	22.598	2.386	90.45 %
	c. Buku KIA	24.984	22.598	2.386	90.45 %
3.	**Pelayanan kesehatan**	**Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan**			**92.97%**

	bayi baru lahir	**layanan kesehatan**			
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
		23.794	**22.122**	**1.672**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	a. Vaksin Hepatitis BO	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	b. Vitamin K1 Injeksi	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	c. Salep/Tetes Mata Antibiotik	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	d. Formulir Bayi Baru Lahir	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	e. Formulir MTBM	23.794	22.122	1.672	92,97 %
	f. Buku KIA	23.794	22.122	1.672	92,97 %
4.	**Pelayanan kesehatan balita**	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan			**70,55%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
		118. 291	**88.950**	**29.341**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	a. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	118.291	88.950	29.341	75,20 %
	b. Formulir DDTK	118.291	88.950	29.341	75,20 %
	c. Buku KIA	118.291	88.950	29.341	75,20 %
	d. Vitamin A Biru	23.691	13.978	9.713	59,00 %
	e. Vitamin A Merah	118.291	72.158	46.133	61.00 %
	f. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell	23.691	15.716	7.975	66.34 %
	g. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella	23.700	16.202	7.498	68.36 %
	h. Jarum Suntik dan BHP	118.291	64.623	53.668	54.63 %
	i. Peralatan Anafilaktik	37	37	0	100 %
5.	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			**52.52%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		212.305	**125.981**	**86.324**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayani	Persentase capaian 100%
	a. Buku Raport Kesehatanku	212.305	122.446	86.324	59.34 %

	b. Buku Pemantauan Kesehatan	212.305	122.446	86.324	59.34 %
	c. Kuesioner Skrining Kesehatan	212.305	122.446	86.324	59.34 %
	d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	2.000	846	1.154	42,3 %
	e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2.000	846	1.154	42,3 %
6.	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif**	**Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			**94.92%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		996.173	**142.683**	**853.490**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	1. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	344	309	35	89.83 %
	2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	344	344	0	100.00 %
7.	**Pelayanan kesehatan pada usia lanjut**	**Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan**			22.68%
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		229.118	**51.958**	**177.160**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	a. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	229.118	51.958	177.160	22.68 %
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen	229.118	51.958	177.160	22.68 %

	Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)				
	c. Buku Kesehatan Lansia	229.118	51.958	177.160	**22.68 %**
8.	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**	**Pelayanan kesehatan penderita hipertensi**			**96,61 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		438.654	**47.063**	**391.591**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	a. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	344	344	0	100 %
	b. Tensimeter	344	309	35	89,83 %
	c. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	344	344	0	100 %
9.	**Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus**	**Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan**			**57.08%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		31.858	**15.308**	**24.474**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	a. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	31.858	15.308	16.550	48,05 %
	b. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	344	344	0	100 %
	c. Pedoman dan Media KIE	31.858	7.384	24.474	23,18 %
10.	**Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat**	**Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan**			**100 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		3.022	**3.399**	**0**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yangTerlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%

	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
	Media KIE	37 (Puskesmas)	37 (Puskesmas)	0	100 %
11.	**Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**	**Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan**			**100 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	
		15903	**5098**	**10804**	
		**jumlah yang harus dilayani*	**jumlah yang Terlayani*	**yang belum Terlayani*	Persentase capaian 100%
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	37	37	0	100 %
	Reagen Zn TB	15.903	35.000	-19.097	220,08 %
	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	15903	20.000	-4.097	125,76 %
	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	15.903	10.000	5.903	62,88 %
	Catridge Tes Cepat Molekuler	15.903	5.000	10.903	31,44 %
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	45	45	0	100 %
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	45	45	0	100 %
12.	**Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)**	**umlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan**			**92,05%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**29.974**	**22.574**	**7.400**	
	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	37	37	0	100 %
	Tes Cepat HIV (RDT)	29.642	22.574	7.068	76.16 %

	Pertama				
	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	37	*37*	0	100 %
Total Capaian SPM Bidang Kesehatan				**79,38%**	

4.2.4 Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	361.925.000	288.585.000	79.74 %
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5395783000	4279548495	79,31 %
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	45.280.000	28.800.000	63.60 %
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	214.485.000	129.475.000	60.37 %
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.855.000	38.050.000	43.31 %
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	104.355.000	72.425.000	69.40 %
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	86.150.000	7.725.000	8.97 %
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.685.000	13.560.000	99.09 %
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.145.000	15.005.000	92.94 %
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	133.695.000	91.245.000	68.25 %
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	131.457.000	32.436.000	24.67 %
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	345.772.500	69.904.000	20.22 %
13.	Bantuan Operasional Kesehatan	38.220.178.000	26.652.634.133,59	69,73%
Total		**45,156,765,500**	**31,719,392,628**	**70.24 %**

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, pemberian layanan kesehatan khususnya layanan dasar kesehatan sebagaimana termaktub dalam layanan SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri didukung oleh kelembagaan serta personil kesehatan. Guna menunjang pelayanan kesehatan Kabupaten Kediri terdapat 2 Rumah Sakit, UPTD laboratorium Kesehatan, UPTD BPFAK dan 37 UPTD Puskesmas. Dari 37 Puskesmas di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi tahun 2018, terdiri terdapat 3 puskesmas yang dengan tingkat kelulusan paripurna, 18 puskesmas lulus utama, 14 puskesmas lulus madya dan 2 puskesmas lulus dasar. Personil kesehatan pendukung sebagai berikut :

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	1.283	Orang
	Tenaga kontrak	860	Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	29	Orang
	Sarjana (S1)	712	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	790	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)		Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	22	Orang
	SLTA	584	Orang
	SLTP	5	Orang
	SD	1	Orang
Pangkat dan Golongan (PNS)	Pembina Utama Muda (IV c)	4	Orang
	Pembina Tingkat I(IV b)	44	Orang
	Pembina (IV a)	3	Orang
	Penata Tingkat I (III d)	332	Orang
	Penata (III c)	124	Orang
	Penata Muda Tk. I (IIIb)	206	Orang
	Penata Muda (III a)	174	Orang
	Pengatur Tingkat I (II d)	208	Orang
	Pengatur (II c)	169	Orang
	Pengatur Muda Tk. I (II b)	16	Orang
	Juru Tingkat I (I d)	2	Orang
	Juru Muda Tk. I (I b)	1	Orang
Pejabat Struktural	Eselon III	4	Orang
	Eselon IV	57	Orang

Struktur Organisasi	Sekretariat	1	Sekretariat
	Bidang	4	Bidang
	Sub Bagian	3	Sub Bag
	Sub Bidang/Seksi	12	Seksi
Jumlah Jabatan Fungsional	Dokter	48	Orang
	Dokter gigi	41	Orang
	Perawat	188	Orang
	Bidan	352	Orang
	Pranata Laboratorium Kesehatan	30	Orang
	Nutrisionis	31	Orang
	Apoteker	13	Orang
	Asisten apoteker	33	Orang
	Perawat gigi	43	Orang
	Sanitarian	37	Orang
	Fisioterapist	1	Orang
	Teknis elektromedis	1	Orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 83,74 % dari target SPM 100%. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Ibu hamil enggan atau takut ke puskesmas (FKTP) karena takut tertular covid-19;
2. Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dari POGI dan kelas ibu hamil;
3. Masyarakat datang untuk memeriksakan kehamilannya diusia kandungan lebih dari 12 minggu;
4. Ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri ;
5. Mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga sulit untuk dipantau

Solusi :

a. Sweeping ibu hamil oleh petugas ditingkatkan dengan protokol kesehatan;

b. Perbaikan alur tatalaksana pelayanan maternal, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi;
c. Mengaktifkan Posyandu Ibu hamil dan kelas Ibu hamil dengan protokol kesehatan;
d. Meningkatkan Kepedulian masyarakat melalui program Peduli Keluarga;
e. Mengaktifkan Desa P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komlikasi);
f. Meningkatkan jejaring dengan Fankes di wilayah kerja Puskesmas;
g. Meningkatkan peran dari Pj KIA.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian kinerja Pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 90,45% dari target capaian SPM 100%. Hal ini dikarenakan masih ada Ibu melahirkan di luar fasilitas kesehatan yang ada yaitu sebanyak 11 ibu, dan 3 orang ibu bersalin di dukun bayi tradisioanal.

Solusi :

Dalam upaya meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kesadaran Ibu untuk bersalin pada Faskes. Hal ini dapat dilakukan melalui :

a. Pemberian bimbingan dan penyuluhan termasuk pada keluarga untuk memberikan dukungan pada Ibu untuk bersalin pada Faskes yang ada.
b. Meningkatkan Jejaring Fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dan menyiapkan sarana prasarana.
c. Mekasanakan screening covid sesuai panduan sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di Rumah sakit dan
d. Melakukan kegiatan Kemitran antara Bidan dan Dukun.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Capaian saat ini 92,27%, belum sesuai dengan dari target yang diharapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan:

1. Masyarakat enggan membawa bayinya ke fasyankes.
2. Ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk pelindung diri.
3. Adanya bayi yang meninggal pada usia 0-28 hari yaitu sebanyak 162 bayi.

Solusi :

1. Dilakukan upaya promotif pemberian layanan kesehatan bayi baru lahir guna meningkatkan kesadaran Ibu dan keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.
2. Dilakukan sosialisasi melalui berbagai media termasuk media sosial.
3. Melakukan kunjungan bayi melalui daring untuk tetap memantau kesehatan bayi baru lahir.

Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Pelayanan kesehatan balita sebesar 70,55% jauh dari target capaian SPM 100%. Permasalahan yang dihadapi :

a. Karena masih banyak balita yg masih belum lengkap mendapatkan pelayanan kesehatan antara lain imunisasi rutin masih belum lengkap diterima oleh semua balita khususnya imunisasi dasar dan lanjutan usia 18-24 bln.
b. Kurangnya jam buka posyandu atau posyandu belum berfungsi sebagaimanan mestinya, didukung dari Surat Edaran Bupati yang menghentikan operasional Posyandu di era pandemi.
c. Selama masa pandemi Masyarakat enggan ke Posyandu
d. Kurangnya rarana dan prasarana terutama APD bagi petugas

Solusi :

a. Maksimalkan kegiatan posyandu dalam pelaksanaan pemantauan perkembangan pada balita sehat sesuai usianya dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Gugus Covid dalam penyelenggaraan Posyandu;
b. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Balita;
c. Kunjungan ke rumah pada balita yang berisiko;
d. Melengkapi petugas kesehatan dengan APD yang lengkap;
e. Meningkatkan Kerjasama dengan Guru TK dan PAUD dalam pemantauan; dan
f. Melatih guru TK dan PAUD dalam pelaksanaan SDI/TK.

Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 51,52% dari target SPM 100%.

Permasalahan : Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara optimal dikarenakan pandemi covid 19, dimana pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan secara daring dari rumah.

Solusi :

1. Melakukan inovasi pemberian layanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar melalui pemberian layanan screening kesehatan secara non tatap muka menggunakan aplikasi; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kemenag dan lintas sektor.

Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Capaian Pelayanan kesehatan usia produktif sebesar 94,92 % dari target SPM 100 %. Capaian ini sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan kembali.

Permasalahan :

1. Kemauan dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan screening kesehatanya masih sangat rendah;
2. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan Posbindu yang ada di masyarakat tidak berjalan; dan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk deteksi dini penyakit tidak menular di Posbindu.

Solusi :

a. Advokasi kepada Desa supaya bisa membantu dalam pengembangan Posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakan masyarakat untuk deteksi dini penyakit tidak menular dengan protokol kesehatan;
b. Refresing kader Posbindu yang sudah terbentuk ataupun belum terbentuk;
c. Monitoring pelaksanaan kegiatan screening usia produktif lewat FKTP, Jaringan dan Jejaring dalam masa pandemi covid-19;

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Capaian Pelayanan kesehatan usia lanjut sebesar 22,68% jauh dari target SPM sebesar 100%

Permasalahan :

a. Kondisi pandemi covid-19 membuat masyarakat takut dan enggan datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri, apalagi untuk lansia yang merupakan golongan resiko tinggi; dan
b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat (Lansia) di wilayah yang masih kurang peduli terhadap kesehatannya.

Solusi :

a. Meningkatkan Kerjasama dengan DPMPD dan Bappeda untuk sosialisasi penggunaan dana Desa untuk membantu pembiayaan Posyandu Lansia;

b. Melakukan sosialisasi Kesehatan Usia Lanjut sesuai Surat Edaran Bupati dan optimalisasi posyandu lansia; dan
c. Kunjungan ke rumah lansia dengan protokol kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar 96,61% dari target SPM 100 %. Permasalahan sebagai berikut :

a. Kurangnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk mememeriksakan kesehatan secara rutin ke Posbindu (pos binaan terpadu);
b. Meskipun sudah terdeteksi menderita tekanan darah tinggi, namun pasien tidak mau datang ke tempat pelayanan kesehatan karena merasa tidak ada keluhan dan merasa sehat sehat saja;
c. Masa pandemi Covid-19 masyarakat banyak yang merasa takut untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan.

Solusi :

a. Advokasi kepada Desa supaya bisa membantu dalam pengembangan Posbindu dan ikut memfasilitasi sarana prasarana kegiatan Posbindu dan bisa menggerakan masyarakat untuk Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dengan protokol kesehatan.
b. Meningkatkan SDM Petugas Puskesmas Pengelola PTM

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus sebesar 57, 08 % dari target SPM 100 %. Indikator capaian SPM adalah jumlah penderita Diabetes Melitus yang dilayani sesuai standar sebanyak 15.308 Orang yang dilayani dari target sejumlah 31.858 Orang.

Permasalahan :

1. Masyarakat belum memahami tentang penyakit Diabetes Melitus dan masyarakat belum paham pentingnya melakukan deteksi dini penyakit PTM (DM); dan
2. Sarana dan prasarana untuk deteksi dini penyakit tidak menular belum semua Desa mempunyai Posbindu kit.

Solusi :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyakit diabetes militus dan kesdaranan deteksi dini diabetes meiitus;
2. Melengkapi sarana prasarana untuk deteksi dini diabetes melitus melalui Posbindu Kit; dan
3. Memperluas cakupan desa yang memiliki Posbindu.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah mencapai target SPM. Presentase ODGJ berat yang ditangani sesuai standart sudah mencapai target 109,25% dari target kasus ODGJ berat sejumlah 3.315 orang dan ditangani sesuai standart sejumlah 3.302 orang. Di Kabupaten Kediri masih ada ODGJ berat yang di pasung dari kasus pasung sejumlah 175 Orang. Untuk bebas pasung tahun 2020 masih belum bisa tercapai masih 14,3% yang belum bebas pasung karena ada beberapa kendala masih tingginya stigma masyarakat tentang ODGJ dan pembebasan pasung berbasis masyarakat masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Untuk ODGJ berat yang sudah membaik di fasilitasi dengan pembentukan Posyandu Jiwa supaya ODGJ bisa mandiri dan produktif. Jumlah Posyandu Jiwa yang ada di Kabupaten Kediri sejumlah 26 Posyandu yang tersebar di 26 Puskesmas di wilayah Kabupaten Kediri.

Untuk tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19 posyandu jiwa tidak dilaksanakan. Untuk memantau perkembangan ODGJ (Kepatuhan minum obat, kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sehari hari) dilakukan kunjungan rumah yang dilaksanakan oleh Kader Jiwa, Bidan Desa dan Perawat Jiwa.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuber Culosis (TB)

Pelayanan kesehatan orang dengan TB telah mencapai target target SPM 100 %.

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Capaian Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus sebesar 92 % dari target SPM 100 %. Permasalahan sebagai berikut :

a. Kemampuan Petugas dalam menggali faktor resiko HIV pasien yang terbatas; dan
b. Adanya stigma buruk tentang HIV sehingga masyarakat / penderita enggan memeriksakan diri ke Faskes.

Solusi :

menambah layanan CST dan konseling terhadap ODHA untuk akses layanan CST.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Dinas Kesehatan dan Bagian Perekonomian.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kabupaten atau Kota Terdiri atas:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik .

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100%	2020
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2020

4.3.3 Realisasi

Target Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1.	**Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**100%**
		4.735 KK	**4.735 KK**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	2.185 KK	2.185 KK	0	100%
	b. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	2.550 KK	2.550 KK	0	100%
2.	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**33,33%**
		14.134 KK	**14.134 KK**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	14.134 KK	14.134 KK	0	100%
	b. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	0	0	0	0%
	c. Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masayarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	0	0	0	0%
Total Capaian Bidang Pekerjaan Umum				**66,67 %**	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**2,333,501,000**	**2,326,802,000**	**99,71**
	a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	71.459.000	71.459.000	100%
	b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.877.542.000	1.877.542.000	100%
	c. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	197.000.000	195.100.000	99,04%
	d. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Perdesaan	187.500.000	186.306.000	99,36%
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**16,321,902,000**	**16,321,902,000**	**100%**
	a. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Bantuan Sosial Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/Stimulan Jamban)	16,321,902,000	16,321,902,000	100%
Total		**18,655,403,000**	**18,648,704,000**	**99,96%**

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pekerjaan Umum, termasuk dalam rangka penerapan pelayanan SPM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibantu oleh 33 PNS dan 22 Tenaga Kontrak sebagaimana data berikut :

NO.	STATUS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				
			SLTP	SLTA	D3	S 1	S 2
1	PNS	33	1	6	1	18	7
2	NON PNS/TENAGA KONTAK	22		10		12	
	JUMLAH TOTAL	**55**	**1**	**16**	**1**	**30**	**7**

Untuk rincian pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh :

1. 1 (satu) Sekretaris
2. 2 (dua) Kasubag
3. 3 (tiga) Kepala Bidang
4. 8 (delapan) Kepala Seksi

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Waktu pelaksanaan kegiatan sering tidak tepat waktu, karena pemberdayaan dan dikerjakan oleh masyarakat.	Serah terima menyesuaikan, hasil pekerjaan.
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Pada Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Kediri telah menganggarkan feasibility study untuk kegiatan pembangunan SPALD-S dan SPALD-T, namun berkenaan dengan pandemic covid-19 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana	Pengajuan penganggaran kembali di tahun 2021

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Kediri Tahun 2020 dilaksanakan oleh BPBD yang mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Perumahan Rakyat pada Kabupaten atau Kota Terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	2020
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2020

4.4.3 Realisasi

Tingkat Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	**Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota**	**Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni**			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**25 %**
		52	**52**	**0**	
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	*jumlah total yang harus dilayani
	a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	52	52	0	0%
	b. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
	c. Pembangunan Baru di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0	0%
	d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0	0%
2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**	**Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni**			**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**0%**
		0	**0**	**0**	
		*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	*jumlah total yang harus dilayani
	a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0	0
	b. Subsidi Uang Sewa	0	0	0	0
	c. Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0	0
Total Capaian Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat				**12,5 %**	

Keterangan : Tidak ada kejadian bencana yang mengharuskan relokasi dan pembangunan baru rumah layak huni bagi korban bencana alam yang terjadi pada Tahun 2020

4.4.4 Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	529.952.500	310.632.700	58,62%
Total		**529.952.500**	**310.632.700**	**58,62%**

4.4.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan rakyat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri dibantu oleh 12 PNS, 8 Tenaga Kontrak dan 13 Pusdalops. Dengan formasi struktural sebagai berikut :

1. 1 (1) Kepala Pelaksana; dan
2. 3 (tiga) Kepala Seksi

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Tidak ada kejadian bencana yang mengharuskan relokasi dan pembangunan baru rumah layak huni bagi korban bencana alam yang terjadi pada Tahun 2020	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Tidak ada kegiatan pemerintah kabupaten yang berdampak pada relokasi rumah layak huni untuk warga pada Tahun 2020	-

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Satpol – PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satpol - PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran), serta BPBD mempunyai tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten atau Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kabupaten atau Kota terdiri atas:

a. pelayanan kerugian materil; dan
b. pelayanan pengobatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana Daerah pada kabupaten atau kota terdiri atas:

a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah pada kabupaten atau kota terdiri atas :

a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100%	2020
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2020
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh Pelayanan informasi rawan bencana	100%	2020
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2020
5	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2020
6	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2020

4.5.3 Realisasi

Tingkat Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi			
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	100 %
		8.654	8.654	0	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	8.654	8.654	0	100 %
	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	8.654	8.654	0	100 %
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			Total Pencapaian
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	100 %
		8.654	8.654	0	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Penegakan Perda sesuai SOP	8.654	8.654	0	100 %
	b. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	8.654	8.654	0	100 %
	c. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	8.654	8.654	0	100 %

3	Pelayanan informasi rawan bencana				Total Pencapaian
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	66.48%
		442.356	442.356	0	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	0	100%
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	442.356	442.356	0	100%
	c. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	57.262	57.262	0	100%
	d. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	355	115	240	32,39%
	e. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				Total Pencapaian
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	94,68%
		21.295	21.075	220	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21.295	21.075	220	94,68%

5	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**				**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang Terlayani	*yang belum Terlayani	**100%**
		166.318	**166.318**	**0**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	19.258	19.258	0	100%
	b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	20.416	20.416	0	100%
	c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	31.898	31.898	0	100%
	d. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	371	371	0	100%
	e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2	2	0	100%
	f. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	166.318	166.318	0	100%
6	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**				**Total Pencapaian**
	*Jumlah yang harus dilayani	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	**100%**
		61	**36**	**25**	
		Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah Yang Belum Terlayni (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	a. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	61	61	0	100%
	b. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	61	61	0	100%
Total Capaian Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat				**93,53%**	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	40.300.000	18.825.000	46.71 %
	Jumlah	**40.300.000**	**18.825.000**	**46.71 %**
2.	**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**			
	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	415.625.000	283.275.000	68.16 %
	b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.075.000	35.000.000	68,55 %
	c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	69.250.000	17.280.000	24,95 %
	d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	-	-
	Jumlah	**470,700,000**	**318,275,000**	**67,62 %**
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
	a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	4.363.107.273	2.487.903.639	57.02 %
	b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	161.0664.000	881.658.000	54,74%
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	56.800.000.000	56.800.000.000	100 %
	Jumlah	**62,773,771,273**	**60,169,561,639**	**95,85 %**
4.	**Kegiatan Lain-nya**			
	a. Penyiapan pengendalian bahaya kebakaran	223.640.250	170.259.814	76,13%
	b. Obstip penegakan pelanggaran Perda/Perbup	1.862.637.500	1.504.535.508	80,77 %
	c. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (manajemen logistik)	69.200.000	18.280.000	26,42 %
Jumlah		**2,155,477,750**	**1,693,075,322**	**78,55 %**

4.5.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri dibantu oleh 66 PNS dan 145 Tenaga Kontrak sebagaimana data berikut :

I		**STATUS KEPEGAWAIAN**	
	1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	66
	2	Tenaga Kontrak	145
II		**JENJANG PENDIDIKAN**	
	1	Sarjana Strata 2 (S2)	7
	2	Sarjana Strata 1 (S1)	15
	3	Diploma IV (D IV)	0
	4	Diploma III (D III)	5
	5	Diploma II (D II)	0
	6	Diploma I (D I)	0
	7	SMA/SMK	31
	8	SLTP	8
		JUMLAH	66

dari 66 PNS Kepala Satpol-PP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1. 1 (satu) Sekretaris;
2. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian;
3. 5 (lima) Kepala Bidang; dan
4. 10 (sepuluh) Kepala Seksi.

Sementara untuk melaksanakan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri dibantu oleh 12 PNS, 8 Tenaga Kontrak dan 13 Pusdalops. Dengan formasi struktural sebagai berikut :

1. (1) Kepala Pelaksana; dan
2. (tiga) Kepala Seksi

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	✓ Jumlah satpol pp yang kurang memadai dibanding jumlah penduduk kabupaten kediri.	✓ Penambahan PNS satpol PP ✓ Peningkatan SDM satpol PP melalui Diklat ✓ Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat PPNS
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	✓ Kualitas dan Kuantitas SDM satpol PP dibidang penindakan pelanggaran Perda masih minim	✓ Penambahan PNS satpol PP. ✓ Peningkatan SDM satpol PP melalui Diklat. ✓ Pengiriman PNS untuk mengikuti diklat PPNS.
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pembuatan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana tidak terlaksana karena ada refocusing anggaran covid 19	Pemberitahuan informasi secara rutin, rawan bencana lewat whatsaapp grup TSBD di Kabupaten Kediri
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana), pendidikan rawan bencana dengan media boneka tobong, pembentukan sekolah siaga bencana, jambore Tim Siaga Bencana Desa tidak terlaksana karena ada refocusing.	Pemberitahuan informasi secara rutin, rawan bencana lewat whatsaapp grup TSBD di Kabupaten Kediri
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Dengan cakupan luas wilayah kabupaten kediri dibandingkan SDM pelayanan sangat kurang.	Pengadaan bantuan tenaga lewat Unit Reaksi Cepat dari tiap kecamatan

6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	✓ Kurangnya sarana dan prasarana, keahlian bagi personil PMK sehubungan dengan alih fungsi Bidang PMK yang tidak hanya menangani kebakaran akan tetapi bertambah menjadi rescue (penyelamatan) secara luas. ✓ Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang hanya 1 dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kediri.	✓ Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengusulkan pengadaan sesuai skala prioritas kebutuhan. ✓ Mengadakan peningkatan kualitas keahlian dan pengetahuan bagi petugas PMK dengan mengirimkan diklat atau pelatihan. ✓ Secara bertahap menambahkan WMK dan menjalin kerjasama yang baik dengan Instansi terdekat yang mempunyai Tim PMK.

4.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan SPM bidang sosial di Kabupaten Kediri secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang jaminan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Sosial pada Kabupaten atau Kota Terdiri atas :

a. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti ;
b. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
d. Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun
		Indikator	Terget Nilai	
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang diasbilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti	100%	2020
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2020
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2020
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandagan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	2020
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca	Jumlah warga negara korban bencana kab yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	2020

4.6.3 Realisasi

Penerapan SPM bidang sosial diperuntukkan dalam pemberian layanan sosial dasar pada penerima sasaran yang berhak mendapatkan layanan SPM. Pemenuhan mutu layanan dasar dicapai melalui pemenuhan jumlah standar barang/jasa layanan sosial yang diberikan. Pengukuran kinerja berdasarkan capaian indikator di dalam SPM bidang sosial sesuai ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah realisasi capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kediri Tahun 2020 akan disajikan dalam tabel berikut :

No	Indikator/Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			46,67 %
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		184	184	0	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	12	12	0	100 %
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0	0 %
	e. Penyediaan Permakanan	102	102	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	g. Penyediaan Alat bantu	9	9	0	100 %
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	51	51	0	100 %

	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Ana	0	0	0	0 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	4	4	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4	4	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	15	15	0	100 %
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**60,00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang harus dilayani*	**jumlah total yang Terlayani*	*yang belum Terlayani*	
		49	**49**	**0**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	49	49	0	100 %
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Pant	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	49	49	0	100 %
	e. Penyediaan Permakanan	49	49	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	g. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0 %
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	49	49	0	100 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	9	9	0	100 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan	0	0	0	0 %

	Dasar				
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	49	49	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49	49	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	2	2	0	100 %
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti**			**46,67 %**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		173	**173**	**0**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	6	6	0	100 %
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	15	15	0	100 %
	e. Penyediaan Permakanan	100	100	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	**0 %**
	g. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	**0 %**
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0	0 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	0	0	0	0 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Ana	0	0	0	0 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	38	38	0	100 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	15	15	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15	15	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	17	17	0	100 %
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**53,33 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	**jumlah total yang*	**jumlah total*	*yang belum*	

		harus dilayani	*yang Terlayani*	*Terlayani*	
		191	**191**	**0**	
		Jumlah Yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Layanan Data dan Pengaduan	66	66	0	100 5
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Pant	0	0	0	0 %
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0	0 %
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	34	34	0	100 %
	e. Penyediaan Permakanan	34	34	0	100 %
	f. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	g. Penyediaan Alat bantu	0	0	0	0 %
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0	0 %
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	90	90	0	100 %
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandanngan dan pengemis terlantar	90	90	0	100 %
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0 %
	l. Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0	0 %
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	34	34	0	100 %
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	34	34	0	100 %
	o. Layanan Rujukan	0	0	0	0 %
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**			**20 %**
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	
		61.278	**61.278**	**0**	
		Jumlah Total Yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayanai	Persentase capaian 100%
	a. Penyediaan Permakanan	61.278	61.278	0	100 %
	b. Penyediaan Sandang	0	0	0	0 %
	c. Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	0	0 %

	d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	0	0 %
	E. Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0	0 %
Total				**45,33 %**	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu disediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar/Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Realisasi	
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas**	**160,800,000**	**160,800,000**	**100 %**
	b. Penyediaan permakanan	91.800.000	91.800.000	100 %
	c. Penyediaan alat bantu	25.700.000	25.700.000	100 %
	d. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	43.300.000	43.300.000	100 %
2.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	**33.925.000**	**33.925.000**	**100 %**
	e. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	33.925.000	33.925.000	100 %
3.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	**97,325,000**	**97,325,000**	**100 %**
	d. Penyediaan permakanan	90.000.000	90.000.000	100 %
	e. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6.625.000	6.625.000	100 %
	f. Layanan rujukan	700.000	700.000	100 %
4.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**37,195,000**	**37,195,000**	**100 %**
	d. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	15.645.000	15.645.000	100 %
	e. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	21.550.000	21.550.000	100 %
5.	**Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota**	**48.525.000.000**	**46.312.310.438**	**95,44 %**
	a. Penyediaan permakanan (bantuan beras masyarakat terdampak covid.19 untuk 61.278 KK selama 8 bulan)	48.525.000.000	46.312.310.438	95,44 %
Total Anggaran Pelayanan Bidang Sosial		**48,854,245,000**	**46,641,555,438**	**95.47 %**

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan pemberian layanan dasar bidang sosial sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 , Dinas Sosial Kabupaten Kediri didukung oleh personil sebagai berikut :

Status Kepegawaian	Pegawai negeri sipil (PNS)	29	Orang
	Tenaga kontrak	11	Orang
	TKSK		Orang
	PSM		Orang
	TAGANA		Orang
Kualifikasi Pendidikan	Magister (S2)	8	Orang
	Sarjana (S1)	17	Orang
	Sarjana muda/Diploma III (D3)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma II (D2)	-	Orang
	Sarjana muda/Diploma I (D1)	-	Orang
	SLTA	15	Orang
	SLTP	1	Orang

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2020

Jenis PSKS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Orang
Pekerja Sosial Profesional	1	1	2	Orang
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190	153	343	Orang
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	23	10	33	Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial			56	lembaga
Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK)	19	7	26	Orang
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			1	Lembaga
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)			2	Lembaga

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Capaian keberhasilan Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dapat dilihat dari capaian kinerja yang diraih dibarengi dengan serapan anggaran . Ketidakberhasilan pencapaian target SPM 100% dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Dinas Sosial belum memiliki jumlah karyawan yang memadai untuk menangani sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Kediri;
2. Keterbatasan anggaran sehingga pemberian layanan rehabilitasi sosial hanya diberikan untuk jenis layanan yang menjadi prioritas didasarkan pada asesmen petugas;
3. Kurangnya pemahaman SDM Dinas Sosial terkait SPM Bidang Sosial sesuai regulasi terbaru, sehingga belum seluruh layanan diberikan sesuai jenisnya serta belum seluruh jenis layanan dianggarkan;
4. Tidak adanya mobil resque yang khusus untuk menangani PMKS. Sementara ini hanya terdapat mobil resque untuk penanganan bencana alam;
5. Pemerintah desa kurang menyadari perannya dalam penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan terhadap penanganan PMKS;
6. Kurangnya tempat penampungan sementara/shelter
7. Rendahnya SDM para tuna sosial / gelandangan/ pengemis disertai dengan mentalitas dan kurangnya kesadaran untuk hidup layak;
8. Kurangnya kesadaran keluarga terhadap hak-hak anak, rendahnya SDM keluarga dan keterbatasan ekonomi.

Solusi :

1. Penambahan jumlah tenaga untuk menangani PMKS;
2. Pengalokasian anggaran untuk pemenuhan semua jenis layanan kebutuhan dasar termasuk layanan kedaruratan;
3. Pemberian bimbingan teknis terkait penerapan SPM Bidang Sosial;
4. Penyediaan mobil rescue untuk menangani PMKS;
5. Perlu melakukan sosialisasi terhadap pemerintahan desa, PSM dan keluarga;

6. Membangun rumah penampungan sementara;
7. Pembinaan, pendampingan terhadap tuna sosial, dan
8. Peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan

4.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kabupaten Kediri Tahun 2020 yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM yang diampu 6 Perangkat Daerah meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Sosial sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan
1.	Pendidikan Dasar	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
		b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		d. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan dasar
		e. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		f. Penambahan Ruang Kelas Baru
		g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
		h. Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
	Kegiatan lain	Penyelenggaraan Proses Belajar SD dan SMP
2.	Pendidikan Kesetaraan	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	a. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
		b. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
		c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		e. Penyediaan Beasiswa Untuk Anak Miskin
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	a. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

		PAUD
		b. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
		c. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
		d. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang guru PAUD
		f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

- Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Kesehatan Keluarga dan Gizi b. Bantuan Operasional Kesehatan
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a. Jaminan Persalinan
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	a. Kesehatan Keluarga dan Gizi b. Bantuan Operasional Kesehatan
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	a. Kesehatan Keluarga dan Gizi b. Bantuan Operasional Kesehatan
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	a. Kesehatan Keluarga dan Gizi b. Bantuan Operasional Kesehatan
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan Pelayanan penyakit tidak menular dan Keswa
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	a. Peningkatan Pelayanan penyakit tidak menular dan Keswa b. Kesehatan Keluarga dan Gizi c. Bantuan Operasional Kesehatan
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Peningkatan Pelayanan penyakit tidak menular dan Keswa
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan Pelayanan penyakit tidak menular dan Keswa
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan Pelayanan penyakit tidak menular dan Keswa
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengendalian Penyakit Menular
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengendalian Penyakit Menular

➢ Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	-

➢ Program dan Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	-
2.	Sosialisasi dan persiapan Pemyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	-

➢ Program dan Kegiatan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
		b. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
		b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4.	Program Kedaruratan dan Logistik	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana (manajemen logistik)
5.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Penyiapan pengendalian bahaya kebakaran
6	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Obstip penegakan pelanggaran Perda/Perbup

➢ Program dan Kegiatan Bidang Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	a. Penyediaan permakanan
		b. Penyediaan alat bantu
		c. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	a. Penyediaan permakanan
		b. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
		c. Layanan rujukan
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	a. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial
		b. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan permakanan (bantuan beras untuk warga terdampak pandemi *covid-19*)

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Timur ini, disusun berdasarkan *manual* atau Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dari data-data yang disajikan dalam bab-bab di atas dapat disimpulkankan bahwa itulah ikhtiar maksimal yang kami lakukan dalam menyajikan data mengenai: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, yaitu 2020; dan (3) penerapan serta pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

Bila ada yang positif dari capaian kinerja kami menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan otonomi daerah. Sehingga perlu dipelihara dan selalu ditingkatkan sinergi yang telah berjalan dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang kami susun ini secara teknis berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang sangat membantu kami dalam menyelesaikan LPPD yang ter-*cover* dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah:

1. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sudah Sesuai dengan Kewenangan;
2. IKK terdiri dari a) Indikator Capaian Kinerja Makro, b) Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan (*Output* dan *Outcome)*, c) Indikator Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
3. IKK bersifat Dinamis, berdasarkan hasil Koordinasi dengan K/L Pengampu Urusan;

Semoga Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam rangka membangun masyarakat Kabupaten Kediri untuk mencapai visi misi Kabupaten Kediri yang dicita-citakan.